

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF  
DALAM KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA**

**TAHUN 1963-1966**

**(Suatu Kajian Historis)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**Agus Budi Yulianto**

**NIM : 031314032**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2008**

**SKRIPSI**  
**KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF**  
**DALAM KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA**  
**TAHUN 1963-1966**  
**(Suatu Kajian Historis)**

**Agus Budi Yullanto**  
**031314032**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 22 Agustus 2008

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M. Pd.

Tanggal 22 Agustus 2008

**SKRIPSI**  
**KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF**  
**DALAM KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA**  
**TAHUN 1963-1966**  
**(Suatu Kajian Historis)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh  
Agus Budi Yulianto  
NIM : 031314032

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 11 September 2008  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**

	Nama Lengkap
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 11 September 2008  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. Tarsisius Sarkim, M. Pd., Ph.D.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

**“kebahagian terbesar dalam hidup adalah rasa pasti kalau kita dicintai”**

**“Hasil adalah segalanya tapi proses memperolehnya membuat jadi bermakna”**

**“Kuatkanlah tangan yang lemah lesu  
Dan teguhkanlah lutut yang goyah”  
(YESEYA 35 : 3)**



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN



**Karya kecil ini kupersembahkan teruntuk :**  
**Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendampingi, melindungi dan selalu**  
**memberikan segala hal yang terbaik dalam setiap langkah hidupku**  
**Bunda Maria yang sungguh baik hati**  
**Kedua orang tuaku yang tercinta,**  
**(almarhum Bpk.A.Bambang Budi Wiryawan dan Ibu Fransisca Sрни)**  
**Adikku Theresia Ajeng Marganingsih**  
**Nenekku tercinta Sriyatno**  
**Dan selalu untuk seseorang yang selalu menyayangiku dan mendukungku**  
**Thanks for all**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 September 2008

Penulis

Agus Budi Yulianto



**ABSTRAK**

**KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF  
DALAM KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA**

**Tahun 1963-1966 (Suatu Kajian Historis)**

**Oleh : Agus Budi Yulianto**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : (1) Landasan, dasar hukum dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif , (2) latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966, (3) tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber dan heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan penulisan atau historiografi. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teori atau kerangka konseptual.

Hasil penelitian ini adalah : (1) landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah Pancasila dan UUD 1945. Dasar hukumnya adalah Pancasila sila ke-2, pidato Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) prinsip politik luar negeri Indonesia adalah tidak memihak salah satu blok yang sedang bertikai dalam perang dingin, tetapi dalam pelaksanaannya politik luar negeri Indonesia pernah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan bergesernya sifat bebas aktif menjadi politik konfrontatif kepada Malaysia; (2) latar belakang konfrontasi Indonesia Malaysia diawali dengan dibentuknya federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia tidak menerima pembentukan federasi Malaysia dengan alasan federasi tersebut merupakan bentuk neokolonialisme baru yang didalangi oleh Inggris yang menghambat revolusi Indonesia; (3) konfrontasi berdampak bagi situasi politik maupun ekonomi Indonesia maka pemerintahan orde baru menganggap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sudah menyeleweng dari prinsip bebas aktif dengan catatan yang dianggap menyeleweng adalah pelaksanaannya.

**ABSTRACT**

**THE ACTIVE FREE OVERSEAS POLITICS  
IN CONFRONTATION OF INDONESIA WITH  
ON THE 1963-1966  
(a Historical Study)  
By : Agus Budi Yulianto**

The aims in writing this thesis were to describe and analyze: (1) the foundation, the law principles, and the overseas politics principles of active free Indonesia (2) the background of the confrontation of Indonesia against Malaysia on the 1963-1966, (3) the act of Indonesia government in ending the conflict with Malaysia.

The research method which was used include 5 steps, they were finding the topic, gathering the source and heuristic, criticizing the source or verification, interpreting and writing or historiography. The writing method that was used was descriptive analytic, it was a method in historical writing which need the theory based or conceptual utterance.

The results of this research were: (1) the foundation of the principles of active free Indonesia were the five basic principles of the republic Indonesia and the constitution of 1945. The law principles were the five basic principle of the Republic Indonesia, especially the second moral principle and the Hatta's speech in front of *Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat*. The principle of Indonesia abroad policy was not taken side in one block which was differ in option, but on the realization the active free overseas politics Indonesia once has diverged from the basic principles which have been determined as in Pancasila and UUD 1945 by the diversion of active free politics into confrontation politics against Malaysia:(2) the background of the confrontation of Indonesia with Malaysia started with the form of Malaysia federation. Indonesia government rejected the form of Malaysia federation because the federation was a form of new neocolonialism which created by England and impeded to Indonesia revolution: (3) confrontation had an impact for the politics or economy in Indonesia, then the government of new order assumed the active free politics has diverged, in a note what considered as the diverging points was the realization.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Agus Budi Yulianto

Nomor Mahasiswa : 031314032

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

### **KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DALAM KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA.**

**Tahun 1963-1966 (Suatu Kajian Historis)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2008

Yang menyatakan



( Agus Budi Yulianto )

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Suatu Kajian Historis)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena ini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi di Universitas sanata Dharma.
2. Ketua Program Pendidikan Sejarah Universitas Sanat Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
3. Bapak Prof. P.J Suwarno, S.H, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing, serta memberi banyak saran, masukan dan pemikiran.
4. Bapak Drs. B Musidi, M.Pd, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing, serta memberi banyak saran, masukan dan pemikiran.
5. Seluruh dosen Program Pendidikan Sejarah dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini khususnya, dan dukungan serta bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan sumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Antonius Bambang Budi Wiryawan dan Ibu Fransisca Srini yang telah memberikan dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma, serta mbah Sriyatno, Theresia Ajeng Marganingsih, Fransisca Ovita Sari, dan Nina Setyorini terima kasih untuk dukungannya.
8. Semua teman-teman seperjuangan di Universitas Sanata Dharma Valentina Lussy, Fransiska Ernawati, Icha, Ari Trijayanti, Kristitin, Nova Setiawan, Antonius Kristiono, Andina Putri, Brigitha Redemta, Tata, Yudhita Prasesti, Ika Yuniana, Elias, Kristin Kurniawati, Feri Trimilo, Wahyuni atas bantuannya.
9. Semua penghuni kontrakan Grinjing 12 Gepeng, Katimo, Guntur, Santos, Ateng, Kempet, Manda, Mbendil, Panjoel, Mas Itus, Gembrok, Mamang, Samohunk, dan Diduk terima kasih atas kebersamaan dalam satu keluarga, canda tawa dan dukungannya.
10. Semua teman-teman Mudika St. Yohanes Rasul Wonogiri Pendek, Celine, Jaman, Sehat, Geri, Mas Aan terima kasih atas petuah dan canda tawa bersamanya. Tak lupa juga buat Imandari, Venesia, Rere, Santi, Mas Dicky dan Rama terima kasih atas kebersamaan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tiada yang sempurna. Demikian juga skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun.

Yogyakarta, Agustus 2008

Penulis

Agus Budi Yulianto

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Landasan Teori.....	8
F. Hipotesis .....	11
G. Metode dan Pendekatan .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN, DASAR HUKUM DAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia.....	19
B. Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif.....	23
C. Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif .....	29
<b>BAB III : LATAR BELAKANG KONFRONTASI INDONESIA TAHUN 1963-1966.....</b>	<b>34</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Latar Belakang Pembentukan Federasi Malaysia.....	34
1. Tujuan Pendirian Federasi Malaysia.....	34
2. Penyelidikan Misi PBB.....	43
B. Penolakan Indonesia Terhadap Federasi Malaysia : Suatu Pertentangan Ideologi .....	45
1. Pertentangan Militan antara Prinsip Anti Imperialisme Kolonialisme dengan Neokolonialisme .....	45
2. Pertentangan antara Ideologi Komunis dan Liberalis.....	48
C. Provokasi Mengganyang Malaysia .....	53
1. Provokasi awal dan Diplomasi yang gagal.....	53
2. Peningkatan Provokasi.....	57
D. Konfrontasi Indonesia Bukti Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif .....	62
1. Terbentuknya Aliansi Indonesia RRC .....	62
2. Posisi yang Terisolasi.....	69
<b>BAB IV : AKHIR KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA .....</b>	<b>77</b>
A. Normalisasi Hubungan.....	80
1. Faktor Pendukung Normalisasi.....	80
2. Faktor Penghambat Normalisasi .....	88
3. Jalannya Usaha Normalisasi .....	89
B. Arah Baru Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca 1966 .....	97
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>
<b>SUPLEMEN .....</b>	<b>118</b>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perintah Presiden RI .....	110
Lampiran 2 : Peta Wilayah Rencana Pembentukan Federasi Malaysia.....	112
Lampiran 3 : Surat Perintah Presiden tentang Komando Aksi Sukarelawan.	113
Lampiran 4 : Surat Perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia.....	114
Lampiran 5 : Peta Wilayah Konfrontasi .....	116
Lampiran 6 : Gambar Pidato Presiden dihadapan para Sukarelawan Dwikora tanggal 3 Mei 1964 .....	117



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri suatu negara selalu didasarkan pada kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Demikian juga Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, hal ini sesuai dengan tujuan nasional yaitu “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dunia yang abadi.”

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri dipengaruhi bermacam-macam faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif antara lain posisi geografis, kekayaan alam, potensi penduduk, kebudayaan dan sejarah nasional. Faktor subyektif antara lain kondisi sosial, politik, ekonomi suatu negara dan kondisi dunia internasional pada waktu itu.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan politik luar negeri, diperlukan sejumlah instrumen yaitu diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda dan menggunakan kekuatan senjata. Penggunaan instrumen-instrumen tersebut hampir tidak pernah terjadi secara individual melainkan hampir secara bersamaan.<sup>2</sup>

Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu partisipasi Indonesia untuk ikut menciptakan perdamaian dunia. Sebagai salah satu realisasinya Indonesia kemudian menjadi anggota PBB dan menyelenggarakan Konferensi

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Politik luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*, Bandung : Alumni, hlm 153-154.

<sup>2</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*, Bandung, : Bina Cipta, hlm 57.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

Asia Afrika I pada tahun 1955 di Bandung. Secara politis pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif akan menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia, disamping itu secara ekonomis pembangunan akan terjamin pula pelaksanaannya. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten akan menempatkan Indonesia pada posisi internasional yang tepat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Posisi yang dimaksud adalah tidak memihak salah satu blok yang ada dalam perang dingin yang melanda dunia.

Dalam perkembangannya ternyata politik luar negeri Indonesia pernah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan dengan bergesernya sifat bebas aktif menjadi politik konfrontatif kepada Malaysia, yang menyebabkan Indonesia bersekutu dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Konfrontasi Indonesia Malaysia berdampak luas bagi kehidupan dalam negeri Indonesia. Di bidang ekonomi, anggaran belanja negara sebagian besar digunakan untuk biaya politik konfrontasi sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan lancar. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia mengakibatkan politik luar negeri Indonesia menjadi cenderung ke blok kiri. Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif ini memuncak dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB dan terciptanya poros Jakarta – Peking.

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui secara mendalam pergeseran politik luar negeri bebas aktif ke arah politik luar negeri yang konfrontatif dengan adanya kasus konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu juga untuk memahami peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia dari sudut pandang politik luar negeri yang bebas aktif dan bagaimana hubungan luar negeri yang bebas aktif dan

bagaimana hubungan luar negeri Indonesia dengan dunia internasional dari tahun 1963-1966. Untuk itu penulis mengajukan judul : “Konsep Politik Luar Negeri Indonesia dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966 (Suatu Kajian Historis)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahasan pada bab-bab berikutnya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apa yang menjadi landasan, dasar hukum dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sampai munculnya orde baru tahun 1966?
2. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966 ?
3. Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan umum  
Untuk mendeskripsi dan menganalisis konsep politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam peristiwa konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.
2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsi dan menganalisis landasan, dasar hukum dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional dari masa kemerdekaan sampai munculnya orde baru tahun 1966.
- b. Untuk mendeskripsi dan menganalisis latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia pada tahun 1963-1966.
- c. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tindakan pemerintah dalam mengakhiri konflik dengan Malaysia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

### 1. Bagi penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dalam dunia internasional dan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan dalam dunia kerja keguruan.

### 2. Bagi pembaca

Melalui penulisan skripsi ini semoga pembaca dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Selain itu juga dapat mengetahui penyelewengan politik luar negeri bebas aktif yang mengakibatkan Indonesia keluar dari prinsip “bebas” sehingga diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dan juga nilai-nilai untuk dijadikan pelajaran agar jangan sampai timbul masalah yang sama.

### 3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Skripsi ini diharapkan mampu menambah dan melengkapi karya ilmiah yang telah ada terutama yang sangat berkaitan dengan sejarah hubungan internasional Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sumber sejarah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya sejarah. Sumber sejarah merupakan pangkal tolak dari rekonstruksi yang akan dibangun. Selain itu, sumber ini dapat juga diistilahkan sebagai modal rekayasa rekonstruksi sejarah, karena dari sumber dapat ditarik suatu fakta sejarah yang kemudian menjadi dasar usaha menghidupkan peristiwa masa lampau.

Sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber sejarah tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan artefact<sup>3</sup>. Menurut sifatnya, sumber sejarah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis, yang orang atau alat tersebut ada atau hadir dalam peristiwa yang diceritakan (saksi pandangan mata)<sup>4</sup>. Jadi dapat dikatakan sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari saksi mata tanpa diubah-ubah keasliannya. Sumber primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, hlm 94.

<sup>4</sup> Louis Gottschalk, 1983, *Understanding History : A Primer of Historical Method*, Jakarta : UI Press, hlm 35.

Pertama, buku terbitan Departemen Penerangan. *Manifestasi Politik Republik Indonesia*, buku ini diterbitkan tahun 1959, berisi tentang keputusan Dewan Pertimbangan Agung mengenai landasan pokok pelaksanaan atau perijinan manifesto politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959. Dan juga berisi pidato presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno yang disampaikan pada hari proklamasi tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik).

Kedua, buku terbitan Departemen Penerangan. *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*, buku ini diterbitkan tahun 1964 berisi tentang latar belakang terjadinya konflik dengan Malaysia, dokumen-dokumen, keterangan pemerintah mengenai pengganjangan Malaysia, serta keluarnya DWIKORA.

Ketiga, buku *Dasar Politik Luar Negeri Kita* yang ditulis oleh Mohammad Hatta, diterbitkan tahun 1946 oleh penerbit Negara, berisi tentang dasar jalannya politik luar negeri Indonesia serta faktor-faktor yang mendasari Indonesia melakukan politik Bebas Aktif, dalam buku ini juga disebutkan bahwa dasar politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan pembukaan UUD 1945

Keempat, buku *Memenuhi Panggilan Tugas "6", Masa Kebangkitan ORBA* yang ditulis oleh A.H. Nasution, diterbitkan tahun 1988 oleh CV Haji Mas Agung, berisi tentang peristiwa konfrontasi dengan Malaysia, yang bermula dari MAPHILINDO yang merupakan persatuan rumpun Melayu melawan Neo Kolonialisme Inggris. Dalam buku ini juga menuliskan tentang keterlibatan TNI dalam penyelesaian konflik atau konfrontasi dengan Malaysia.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain.<sup>5</sup> Di lain pihak Louis Gottschalk berpendapat bahwa sumber sekunder adalah suatu kesaksian daripada siapa pun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang disaksikan.<sup>6</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua yang memperoleh berita dari sumber primer atau bisa dikatakan sebagai sumber lain yang tidak sejaman dengan peristiwanya. Sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

Pertama, buku *Indonesian Political Thinking 1945-1965* yang ditulis oleh Herberth Feith dan Lance Castles dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yubhaar Min dengan judul *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, diterbitkan tahun 1988 oleh CV Mas Agung. Buku ini berisi tentang pola pemikiran politik Indonesia dari tahun 1945-1965 naik turun kehidupan politik Indonesia.

Kedua buku *TNI dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia* yang ditulis oleh Mukmin Hidayat. Diterbitkan tahun 1991 oleh penerbit Pustaka Harapan Jakarta. Buku ini berisi tentang keterlibatan TNI dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia Malaysia dilihat dari Politik Luar Negeri Indonesia.

---

<sup>5</sup> Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-norma dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta : Departemen HANKAM, hlm 19.

<sup>6</sup> Louis Gottschalk, *op. cit*, hlm 35

Ketiga buku *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja. Diterbitkan tahun 1983 oleh penerbit Alumni Bandung. Buku berisi pelaksanaan atau aplikasi politik luar negeri Indonesia dalam kerjasama internasional masa kini.

Keempat, buku Konfrontasi, *The Indonesia Malaysia Dispute 1963-1966* yang ditulis oleh Mackie J.A.C. diterbitkan tahun 1974 oleh Oxford University Press Kuala Lumpur. Buku ini berisi tentang konfrontasi antara Indonesia Malaysia tahun 1963-1966 penyebab dan penyelesaian konflik yang terjadi antara kedua negara.

## **F. Landasan Teori**

Untuk kelangsungan hidupnya sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan internasional merupakan kegiatan manusia, baik individual maupun kelompok untuk saling mengadakan interaksi sebagai anggota masyarakat dunia. Berbagai bidang kehidupan dapat dilakukan melalui hubungan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, kepentingan nasional suatu bangsa yang antara lain untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, kemerdekaan dan pelayagunaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya, dapat tercermin dalam politik luar negeri mereka masing-masing.

Penulisan ini menggunakan beberapa konsep yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran. Konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif dan konfrontasi Indonesia Malaysia.

Konsep politik luar negeri bebas aktif, untuk memudahkan pengertiannya sebaiknya dipisahkan pendefinisian. *Konsep* berarti pengertian, pendapat atau rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran.<sup>7</sup> *Politik* berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara-negara lain.<sup>8</sup> Sedangkan *luar negeri* menunjuk kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri (wilayah atau otoritas). Bebas berarti tidak memihak salah satu blok (netral) sedangkan aktif berarti ikut serta dalam kegiatan di luar demi kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat dunia.

Banyak pengarang yang menganalisis mengenai politik luar negeri dan hasilnya sangat beragam. Definisi itu antara lain :

Sumpena Prawirasaputra mendefinisikan :

“Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan sesuatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya”.<sup>9</sup>

Dudi Singadilaga mendefinisikan :

“Politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan satu negara dalam cara mengendalikan hubungan-hubungan luar negeri, sedemikian rupa sehingga dapat dicapai tujuan nasional yang dibebankan negara itu oleh rakyatnya”.<sup>10</sup>

M. Sabir mendefinisikan :

“Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain”.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Poerwodarminto, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 520.

<sup>8</sup> Ibid hlm 763.

<sup>9</sup> Sumpeno Prawirasaputra, 1984, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Bandung : CV Remaja Karya, hlm 7.

<sup>10</sup> Dudi Singadilaga, 1973, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm 2-3.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep politik luar negeri bebas aktif adalah pengertian atau pendapat suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah nasional yang ditujukan ke luar negeri.

Konfrontasi Indonesia Malaysia, untuk lebih memudahkan dalam memberikan konsep dasar pengertian maka kalimat konfrontasi Indonesia Malaysia dapat dipisahkan penggabungannya. Konfrontasi berarti berhadapan, terutama antara dua negara atau dua kekuatan politik dunia yang saling bertentangan.<sup>12</sup> Kamus politik memberikan arti sebagai cara menentang musuh atau kesulitan dengan cara berhadapan langsung dan terang-terangan.<sup>13</sup> Jadi konfrontasi Indonesia Malaysia adalah pertentangan antara Indonesia melawan Malaysia akibat adanya suatu perbedaan politik, terutama perbedaan pendapat tentang pembentukan Federasi Malaysia. Ketika Malaya merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957, perdana menteri Tengku Abdul Rahman menyatakan betapa sulitnya menyatukan Malaya dengan Singapura, hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki sejumlah perbedaan seperti : etnis, bahasa dan agama. Dalam suatu pidatonya tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman kemudian mengemukakan gagasannya untuk membentuk suatu federasi Malaysia yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai, ide ini segera menimbulkan pro dan kontra. Indonesia sendiri menyatakan penentangan secara resmi pada tanggal 16 September 1963, semboyan yang terkenal waktu itu adalah *Ganyang Malaysia*.<sup>14</sup> Alasannya, karena federasi ini dianggap sebagai

---

<sup>11</sup> M Sabir, 1987, *Politik Bebas Aktif*, Jakarta : Masagung, hlm 10.

<sup>12</sup> Poerwodarminto, op. cit, hlm 519

<sup>13</sup> Muhaimin, 1985, *Kamus Istilah Politik*, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 132

<sup>14</sup> Ganyang adalah kata dalam bahasa jawa yang berarti makan sampai habis, jadi dapat diartikan ganyang Malaysia adalah menghancurkan Malaysia sampai luluh lantak (hancur lebur)

suatu bentuk neokolonialisme yang disponsori oleh negara Blok Barat yakni Inggris.

Pengertian kajian historis yaitu usaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Di dalam kajian historis tidak hanya digunakan dalam penelitian sejarah tetapi bisa juga digunakan untuk meneliti perkembangan sistem pendidikan, kurikulum, penilaian dari periode ke periode sebagai bahan untuk masa mendatang.<sup>15</sup>

Sikap Soekarno sangat keras dalam pembentukan negara federasi Malaysia ini, karena Soekarno memandang bahwa pembentukan negara federasi ini adalah salah satu bentuk neo kolonialisme baru. Anggapan Soekarno diperkuat karena pembentukan federasi ini didalangi oleh Inggris yang merupakan negara kolonial. Sikap Soekarno ini juga didasari karena Soekarno tidak ingin Indonesia yang baru merdeka dari jajahan negara kolonialis seperti Belanda harus berjuang lagi untuk mendapatkan kemerdekaan. Soekarno tidak ingin perjuangan masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun menghadapi kolonialisme menjadi percuma karena hadirnya neokolonialisme baru yang muncul di negara tetangga yang nantinya mengganggu stabilitas nasional Indonesia sendiri.

## **G. Hipotesis**

Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari dua penggalan kata, yaitu “hypo” yang artinya “di bawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Kemudian penulisan hipotesis disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis

---

<sup>15</sup> Nana Sudjana, 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru, hlm 81.

Dari beberapa rumusan masalah di atas selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Jika landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah Pancasila dan UUD 1945 dan dasar hukum pelaksanaannya adalah Pancasila dan pidato Hatta dihadapan BP KNIP, maka Indonesia menjadi negara yang netral (non blok) dalam percaturan politik dunia.
2. Jika Malaya membentuk federasi Malaysia maka Indonesia menentang keberadaan federasi ini karena dianggap ciptaan kolonialis yang mengganggu dan menghambat jalannya revolusi Indonesia. Federasi Malaysia dianggap Indonesia sebagai bentuk Neo kolonialisme baru yang didalangi oleh Inggris.
3. Kalau konfrontasi Indonesia Malaysia tetap berlanjut berdampak bagi situasi politik maupun perekonomian di Indonesia maka pemerintah orde baru Indonesia berusaha meluruskan kembali politik luar negeri yang mengalami penyelewengan pada masa orde lama.

## **H. Metode dan Pendekatan**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki metode atau cara kerja yang berfungsi untuk memudahkan menemukan suatu kebenaran yang lebih obyektif.<sup>16</sup> Metode ilmiah dalam penelitian sejarah digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisa fakta-fakta

---

<sup>16</sup> Louis Gottschalk, *op. cit*, hlm 32.

yang ada sehingga dapat diketahui secara tepat mengenai kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Penulisan ini ditinjau dari sudut penelitian maka termasuk penelitian studi pustaka. Dalam menyusun penulisan ini, penulis telah mencari sumber data tertulis diberbagai perpustakaan, diantaranya: Kolose Ignatius (Kota Baru), Seminari Tinggi Ilmu Teologi (Kentungan), dan di Universitas Sanata Dharma.

Menurut Nugroho Notosusanto metode historis terdiri dari 4 langkah, yaitu:

- a. Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah.
- b. Kritik sejarah, yaitu kegiatan meneliti apakah jejak tersebut baik bentuk maupun isinya sejati, sehingga benar-benar merupakan fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Interpretasi atau sintesa, yaitu menetapkan makna saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah diterapkan kritik ekstern maupun intern dari data-data yang berhasil dikumpulkan.
- d. Penyajian, yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah.

## 2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu metode penulisan yang menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis sebagai historiografi,

terutama untuk mendeskripsikan peristiwa konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966 dihubungkan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Penulisan sejarah ini dilakukan melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut di antaranya adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi. Di samping itu, dalam penyusunan penulisan sejarah haruslah sistematis yang mencakup beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis, di antaranya: topik, latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kajian teori yang terdiri dari landasan teori dan kajian pustaka dan sistematika penulisan.

### 3. Pendekatan Penulisan

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatannya yaitu dari segi mana memandangnya, dimensi mana dan unsur-unsur mana yang diungkapkan.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan multidimensional, artinya dalam mengungkapkan sejarah menggunakan pendekatan dengan beberapa disiplin ilmu lain dari ilmu-ilmu sosial. Antara lain pendekatan politik digunakan untuk melihat permasalahan atau konflik yang timbul akibat konfrontasi yang terjadi, baik di dalam negeri Indonesia maupun sikap Indonesia terhadap hubungan luar negerinya.

Pendekatan ekonomi untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Konfrontasi Indonesia Malaysia ini bagi masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya, pendekatan ekonomi yang digunakan penulis dapat diambil kesimpulan

---

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 4.

yang cukup nyata mengenai latar belakang di bidang ekonomi dari konfrontasi Indonesia Malaysia, bagi masyarakat Indonesia yang terpuruk dalam bidang ekonomi karena pemerintah lebih memperhatikan kehidupan politik daripada kehidupan ekonomi rakyatnya.

Pendekatan sosial digunakan untuk melihat reaksi atau keterlibatan masyarakat dalam konflik atau konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Di mana masyarakat Indonesia ikut terlibat lebih banyak disebabkan karena masyarakat Indonesia tidak ingin atau tidak mau adanya kolonialisme baru yang dicurigai dilakukan Malaysia yang merupakan negara persemakmuran Inggris.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, metode penulisan dan pendekatan serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Memaparkan uraian tentang konsep politik luar negeri bebas aktif, dan dasar hukum pelaksanaannya sampai munculnya Orde Baru.

**BAB III** : Memaparkan tentang latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16

BAB IV : Memaparkan tentang sikap atau tindakan pemerintah dalam mengakhiri politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

BAB V : Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB II

### LANDASAN, DASAR HUKUM DAN PRINSIP

#### POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Abad ke 20 disebut sebagai abad nasionalisme bumi putera, karena ditandai dengan munculnya nasionalisme negara-negara di benua Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. Beberapa negara telah mendapatkan kemerdekaannya, dan mereka pun mulai bersemangat untuk mengatur suatu pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dari suatu bangsa atau negara untuk melandasi negara tersebut dalam mengurus rumah tangga negara, mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri, mengikat atau melepaskan persetujuan, berperang atau bersikap netral sesuai dengan kepentingannya yang terbaik. Jadi, suatu negara yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk kelangsungan hidupnya sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan internasional merupakan kegiatan manusia, baik individual maupun kelompok untuk saling mengadakan interaksi sebagai anggota masyarakat dunia. Berbagai bidang kehidupan dapat dilakukan melalui hubungan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, kepentingan nasional suatu bangsa yang antara lain untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, kemerdekaan dan pelayagunaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya, dapat tercermin dalam politik luar negeri mereka masing-masing.

Adapun perkataan politik sebenarnya berasal dari kata Yunani yakni polistais. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Politik dalam arti kebijaksanaan (policy) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan, atau keadaan yang dikehendaki.<sup>18</sup> Secara umum ada tiga faktor penting yang merupakan sasaran politik luar negeri suatu negara yaitu :

1. Pemantapan teritorial dan perlindungan terhadap kehidupan warga negaranya.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kehidupan ekonomi.
3. Mempertahankan kepribadian bangsa yang terungkap di dalam sistem pemerintahan, dan bentuk penanganan terhadap politik di dalam negerinya.

Ke-3 faktor ini merupakan suatu hal yang penting dan mungkin tidak terpisahkan untuk menjadi sasaran politik luar negeri suatu negara.

Indonesia menganut politik luar negeri yang mempunyai sifat bebas aktif. Bebas artinya tidak terikat oleh salah satu blok, dan aktif diartikan sebagai giat atau aktif dalam mengembangkan perdamaian, persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Mohammad Hatta menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti netral, karena politik yang netral tidak membangun perdamaian dunia. Bebas aktif di sini selain Indonesia berada dalam posisi bebas untuk tidak memihak salah satu blok, tetapi di pihak lain Indonesia akan aktif untuk ikut mengusahakan

---

<sup>18</sup> Lemhanmas. 1981. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta : PT Gramedia, hlm 116.

perdamaian dan kesejahteraan dunia. Dengan demikian negara Indonesia tidak condong ke salah satu blok.<sup>19</sup>

Asas politik luar negeri Indonesia secara resmi baru dimulai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Mohammad Hatta selaku perdana menteri di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) di Yogyakarta pada tanggal 2 September 1948.<sup>20</sup> Di satu sisi politik ini dilandasi oleh kepercayaan pada diri sendiri, ini dapat dimengerti karena Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaannya melalui pengorbanan yang besar. Di sisi lain politik ini juga dilandasi oleh kesadaran atas kelemahan diri sendiri, oleh karenanya politik bebas aktif berpedoman pada ketidakinginan terlibat dalam pertentangan internasional.

## **A. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

### **1. Landasan Ideal : Pancasila**

Pancasila merupakan falsafah dan dasar Negara Republik Indonesia lahir dari suatu pemikiran yang serius dan telah disesuaikan dengan kehidupan, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan bangsa Indonesia. Selain mengatur kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam aktifitas dalam negeri, Pancasila ternyata juga erat kaitannya sebagai landasan ideal bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung arti bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Setiap manusia berkedudukan

---

<sup>19</sup> Anak Agung Gde Agung. 1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris : Mouton & Co, hlm 178.

<sup>20</sup> J. Soedjati Djiwandono. 1985. *Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia : Perubahan dan Kesenambungan*. Analisa No. 8, hlm 645.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20

sederajat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih, kuning maupun hitam. Sebagai konsekuensi logisnya, maka bangsa Indonesia tidak menganut paham rasialis. Demikian pula antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya saling menghormati dan saling toleransi. Saling toleransi ini tidak hanya dikembangkan di dalam negeri, tetapi juga lebih luas di dalam kehidupan masyarakat internasional.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia atas manusia atau *explotation de l'homme par l'homme* dan penindasan negara atas negara atau *explotation de nation par nation*. Sila kedua dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia I dan IV. Dari penjabaran ini merupakan penegasan bahwa penjajahan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan maka harus ditentang dan harus dihapuskan dari muka bumi. Kemudian bangsa Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan akan meyokong setiap usaha yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terlihat bahwa bangsa Indonesia menempatkan persatuan di atas segalanya. Kesatuan dan kepentingan negara berada di atas kepentingan pribadi. Dalam implementasinya ke luar negeri, maka bangsa Indonesia menganggap bahwa setiap negara merupakan unit tersendiri yang mandiri dan bukan merupakan sub unit dari negara lain.

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Cerminan dari sila ini adalah bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia yang lainnya mempunyai hak dan kewajiban.

Antara hak dan kewajiban tersebut haruslah seimbang. Tidak dibenarkan kita memaksakan hak dan di lain pihak menghiraukan kewajiban. Demikian pula dalam memutuskan masalah harus dimusyawarahkan dan keputusan diambil secara mufakat. Maka implementasi sila ini berkaitan dengan politik luar negeri yaitu, bahwa setiap masalah atau persoalan internasional harus diselesaikan dengan melalui musyawarah agar dicapai kata sepakat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan sila ini bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan. Rasa tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial selanjutnya diterapkan pula dalam tata pergaulan bangsa Indonesia dengan dunia internasional. Adapun pengembangan sikapnya berupa sikap adil terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berusaha membantu orang lain yang memerlukan. Selanjutnya sikap ini diterapkan pula dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, maka bangsa Indonesia aktif dalam gerakan non blok dan membantu negara-negara yang sedang ditimpa kemalangan seperti bencana alam di India dan bencana kelaparan di Afrika.

## **2. Landasan Struktural : UUD 1945**

UUD 1945 merupakan landasan struktural politik luar negeri Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada alenia I dan IV pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 dan 13 batang tubuh. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22

- a. Alenia I pembukaan UUD 1945 menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Setiap negara di dunia berhak untuk merdeka dan mengatur pemerintahannya sendiri. Untuk itu bangsa Indonesia akan membantu setiap usaha untuk mencapai kemerdekaan Negara-negara lain. Menurut rumusan yang telah disepakati oleh anggota Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, kata “penjajahan” disini mencakup anti kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun.
- b. Alenia IV pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “bahwa negara Indonesia akan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Alenia ini merupakan tujuan jangka panjang dari politik luar negeri Indonesia. Alenia IV pembukaan UUD 1945 memperjelas sikap bangsa Indonesia yang ingin membantu mewujudkan tata kehidupan di dunia yang lebih baik, lebih tertib dan lebih sejahtera.
- c. Pasal 11 yang menyatakan hak presiden yang terlebih dahulu harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan perang, dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara-negara lain.

- d. Pasal 13 yang terdiri dari dua ayat yang berbunyi sebagai berikut : (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Presiden menerima duta Negara lain.

### **3. Landasan Operasional**

Ada tiga hal yang merupakan landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Pertama, ketetapan MPR dalam hal ini Garis-garis Besar Haluan Negara bidang hubungan luar negeri yang berlaku untuk kurun waktu lima tahun. Kedua, kebijaksanaan yang dibuat oleh presiden (KepPres) yaitu setelah berbagai hal yang menyangkut berbagai kebijaksanaan luar negeri dimusyawarahkan oleh para menteri terkait, maka dalam hal-hal yang sangat penting keputusan diambil oleh presiden. Ketiga, kebijaksanaan yang dibuat oleh menteri luar negeri, memang telah merupakan tugas menteri luar negeri untuk menetapkan kebijaksanaan luar negeri yang berdasarkan atas petunjuk dari presiden.

### **B. Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Karena skripsi ini ruang lingkup waktunya hanya sampai awal pemerintahan Orde Baru, maka kajian mengenai dasar hukum ini hanya meliputi empat hal, yaitu:

#### **1. Sila ke-2 dari Pancasila.**

Sila ini merupakan bagian dari Pancasila, sedangkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jika landasan ideal politik luar negeri bebas aktif adalah Pancasila, maka apabila

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

24

dikupas di antara sila-sila yang ada di dalamnya, sila kedua-lah yang terutama mendasari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Sehingga sila ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum dari politik luar negeri bebas aktif tersebut.

Sila kedua kemudian dikembangkan dalam alinea I dan IV Pembukaan UUD 1945 yang menunjuk pada persepsi bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia. Penjabaran pada alinea I Pembukaan UUD 1945 berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selanjutnya pada alinea IV berbunyi: “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Dari uraian ini ditegaskan, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karena itu harus dihapuskan dari seluruh permukaan dunia. Bangsa Indonesia akan mendukung setiap bangsa untuk mencapai kemerdekaannya. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hubungan luar negeri sudah jelas, yaitu ikut secara aktif mengusahakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penekanan lebih diarahkan pada usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada stabilitas Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Kesemuanya ini akan diusahakan tanpa mengurangi kemampuan dan kesediaan membangun dalam negeri. Hubungan internasional didasarkan atas rasa persahabatan, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara masing-masing. Rumusan dari sila ini kemudian dijabarkan melalui Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN) dalam berbagai prioritas dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan nasional.

## **2. Pidato Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 2 September 1948.**

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, Mohammad Hatta adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia.<sup>21</sup> Dasar-dasar politik luar negeri ini pertama kali dikemukakannya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 2 September 1948, dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”. Saat itu Mohammad Hatta menjabat sebagai perdana menteri. Pernyataan dari Mohammad Hatta lebih lanjut dijabarkan dalam artikel yang berjudul *Indonesia Foreign Policy* dan *Indonesia between the power bloc* yang dimuat dalam majalah *Foreign Affairs* tahun 1953 dan 1958. Uraian yang dapat pula dijadikan dasar hukum politik luar negeri Indonesia ini menyatakan bahwa perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan bukan kemudian untuk memilih pro Amerika Serikat atau pro Uni Soviet. Pemerintah Indonesia tidak mengambil posisi sebagai *a passive party* (anggota yang pasif) dalam politik dunia internasional melainkan sebagai anggota dunia yang aktif. Politik luar negeri Indonesia harus diletakkan di atas kepentingan nasional dan disesuaikan dengan situasi dan kenyataan yang ada dan garis politiknya tidak boleh ditentukan oleh garis politik negara lain.<sup>22</sup> Politik ini disimpulkan sebagai politik bebas aktif dan tidak berkeinginan memihak blok

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1982. “*Bung Hatta Peletak Dasar Politik Luar Negeri Kita*” dalam *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Idayu, hlm 198.

<sup>22</sup> Anak Agung Gde Agung. *op. cit*, hlm 44.

Barat maupun Timur dan di lain pihak akan berusaha mengurangi ketegangan di antara dua blok tersebut agar tercipta perdamaian dunia.

### **3. Ketetapan MPRS no. I/MPRS/1960**

Dekrit Presiden yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin membuka babak baru sejarah Indonesia. Dengan adanya dekrit ini berarti mengakhiri sistem demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Dewan Konstituante yang dianggap tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru dan selanjutnya diumumkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Parlementer juga dianggap tidak sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk lebih cocoknya maka diterapkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip utama dari Demokrasi Terpimpin. Diuraikan pula program jangka panjang dan jangka pendek kabinet yang akan membawa kepada jiwa dan cita-cita revolusi Indonesia. Pidato inilah yang kemudian menjadi landasan politik yang dikenal dengan nama Manifesto Politik (Manipol). Manipol selanjutnya ditetapkan sebagai GBHN dengan ketetapan MPRS no. I/MPRS/1960. Keputusan untuk menjadikan pidato ini sebagai GBHN telah disetujui oleh Presiden Soekarno seperti yang telah dikatakannya sebagai berikut ”Saya, selaku kepala negara, Panglima Tertinggi dan Perdana Menteri menyetujui sepenuhnya

pendapat Dewan Pertimbangan Agung tersebut; juga perincian isi pidato tersebut ... yang juga dinamakan Manipol RI ...”<sup>23</sup>

Secara ringkas Manipol memuat dua hal, yaitu persoalan-persoalan pokok revolusi Indonesia dan program umum revolusi Indonesia. Termasuk pula di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kebijaksanaan luar negeri. Maka ketetapan MPRS no. I/MPRS/1960 dapat disebut sebagai dasar hukum dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Menurut Manipol tersebut, kewajiban revolusi Indonesia adalah membebaskan dari semua imperialisme dan menegakkan tiga sendi kerangka revolusi yang meliputi:

- a. Kesatu, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
- b. Kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan sprituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara Asia-Afrika, atas dasar saling menghormati satu sama lain dan atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.<sup>24</sup>

Kemudian tujuan jangka pendek seperti yang tercantum dalam Manipol adalah cukup sandang pangan, keamanan dan melanjutkan perjuangan anti-

<sup>23</sup> Departemen Penerangan RI. 1959. *Manifestasi Politik Republik Indonesia*. Jakarta : Departemen Penerangan RI, hlm 6.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 13

imperialisme serta mempertahankan kepribadian kita di tengah-tengah tarikan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan tujuan jangka panjangnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal abadi.<sup>25</sup>

#### **4. Ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966**

Memasuki Orde Baru (Orba) pemerintah Indonesia berusaha memurnikan politik luar negeri dari penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama (Orla). Pada masa Orde Lama, yakni pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif yang seharusnya tidak menitikberatkan kepada salah satu blok, baik blok Barat maupun blok Timur, ternyata bahkan condong mengikuti RRC dan membentuk poros kesetiakawanan dengan negara-negara komunis, khususnya dengan RRC yang terkenal dengan poros Jakarta-Peking-Pyong Yang.

Didorong oleh keinginan untuk menempatkan politik luar negeri bebas aktif sesuai pada tempatnya, maka pemerintah Orde Baru melalui sidang istimewa mengeluarkan ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali politik luar negeri Indonesia. Ketetapan ini hanya merupakan penegasan kembali, sedangkan yang dianggap menyeleweng adalah pola pelaksanaannya. Dengan demikian ketetapan inipun menjadi dasar hukum bagi politik luar negeri Indonesia sejak awal Orde Baru sampai nanti muncul ketetapan MPR tahun 1973. Dalam ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 antara lain disebutkan bahwa sifat politik

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 16

luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang kesemuanya itu tidak lain adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

### **C. Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Politik luar negeri bebas aktif ini pada kenyataannya mendapat perumusan dan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Namun demikian pada dasarnya prinsip utamanya adalah sama.

Untuk pertama kalinya rumusan politik bebas aktif dikemukakan oleh Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 2 September 1948. Hatta mempertahankan rumusan bebas aktif untuk tidak memihak salah satu blok dan di lain pihak ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia. Menarik untuk diketahui bahwa formula ideal ini pada awalnya dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri pada masa itu yang menginginkan agar Indonesia berpihak kepada Uni Soviet dan sekaligus menolak tuduhan Belanda serta pada saat yang sama untuk menjaga jarak dari pengaruh Amerika Serikat yang secara intensif berusaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Dalam kesempatan itu Hatta mengatakan:

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan

kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.<sup>26</sup>

Uraian ini merupakan suatu deklarasi ketidakberpihakan untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih berarti sebagai subyek dan bukan hanya obyek belaka. Garis politik bangsa Indonesia akan ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bebas aktif bukan berarti politik netral sebab netral tidak berusaha membangun perdamaian dunia. Bebas aktif yang dimaksudkan adalah selain tidak memihak salah satu blok juga bertekad ikut berusaha mewujudkan perdamaian dunia.

Hatta menjabarkan rumusan bebas aktif secara lebih jelas dalam majalah *Foreign Affairs* tahun 1953 sebagai berikut:

“Indonesia tidak memainkan sikap keberpihakan di antara kedua blok yang bertentangan dan menempuh jalannya sendiri dalam berbagai masalah internasional. Kebijakan seperti ini disebut dengan istilah “bebas”, dan kemudian untuk menandainya digambarkan sebagai bebas dan “aktif”. Istilah aktif dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh semangat bagi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan kuat jika mungkin oleh mayoritas anggota PBB.”<sup>27</sup>

Konsep kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini juga merupakan suatu cara untuk mempertahankan prioritas-prioritas dalam negeri.

Penelitian Franklin B. Weinstein terhadap beberapa pemimpin Indonesia menyatakan bahwa prinsip bebas aktif dianggap oleh banyak pemimpin Indonesia sebagai sesuatu yang esensial untuk memelihara harga diri, identitas nasional dan *image* Indonesia. Sejumlah 61% dari para pemimpin yang diwawancarai menginginkan agar Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam percaturan politik dunia. Mayoritas dari mereka juga menganggap bahwa bangsa Indonesia

<sup>26</sup>Mohammad Hatta. 1976. *Mendayung Diantara Dua Karang*. Jakarta : Bulan Bintang, hlm 17-18.

<sup>27</sup>Michael Leifer. 1989. *Indonesia's Foreign Policy terjemahan*. A. Ramlan Surbakti. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : Gramedia, hlm 42.

mampu memerankan peranan dalam percaturan politik dunia, khususnya peranan di Asia Tenggara.<sup>28</sup>

Beberapa kabinet menafsirkan sifat bebas aktif dengan berbeda-beda, walaupun jika ditarik garis lurus kesemuanya itu relatif sama. Kabinet Natsir misalnya, memberikan arti “bebas” sebagai tidak melibatkan diri dalam salah satu blok yang menambah ketegangan. Kemudian “aktif” berarti turut membantu usaha-usaha untuk mencapai cita-cita manusia seperti yang tercantum dalam piagam PBB.

Selanjutnya kabinet Sukiman mengartikan bebas aktif dengan politik tidak netral dalam arti akan bersifat aktif. Dengan prinsip ini pemerintahannya berusaha mendudukkan Indonesia pada taraf dan derajat yang selaras dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan keanggotaannya dalam PBB akan dimanfaatkan untuk membela cita-cita dunia dan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan manusia.

Kabinet Wilopo juga mempunyai rumusan sendiri walaupun dalam prinsipnya tetap sama. Kabinet ini mengartikan sifat bebas aktif dengan menekankan prinsip tidak memihak salah satu blok dan tidak ikut campur dalam pertentangan kedua blok tersebut. Dikatakan pula bahwa perjuangan Indonesia akan disalurkan melalui PBB untuk menghindari keterlibatan langsung berupa bentrokan senjata. Agar tidak menimbulkan keragu-raguan, terutama dari kedua blok yang bertentangan, maka prinsip ini dilengkapi pula dengan sikap “aktif” mengusahakan perdamaian dunia.

---

<sup>28</sup> Prisma. 1977. *Politik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan dari Sukarno sampai Suharto*. Prisma No 9 tahun VI, hlm 83.

Sedangkan kabinet Ali Sastraamidjaja selain berpedoman untuk tidak berpihak salah satu blok juga menambahkan tekadnya untuk meniadakan penjajahan dengan segala sistemnya dan menyelesaikan persoalan Asia secara Asia. Begitulah prinsip-prinsip yang merupakan pejabaran dari sifat bebas aktif yang walaupun berbeda-beda tetapi pada dasarnya masih tetap sama. Selanjutnya Dasa Sila Bandung yang merupakan hasil dari Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung semakin memperkuat dasar-dasar konsepsi politik luar negeri Indonesia dengan menandaskan prinsip-prinsip:

- Ko-eksistensi secara damai antara bermacam-macam ideologi.
- Persahabatan dan politik bertetangga baik untuk *good neighbour policy*.
- Pendirian anti-imperialisme dan kolonialisme.

Dengan demikian setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, maka pedoman politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif bertambah dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia-Afrika, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta mengandung sifat non intervensi.
2. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia dan dikembangkan kerjasama regional.
3. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara atau bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila.
4. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penuh daya tanggap, sehingga pengerahannya terutama untuk kepentingan ekonomi rakyat.

Prinsip-prinsip ini pulalah yang dicantumkan dalam ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali politik luar negeri bebas aktif yang sebelumnya telah diselewengkan pada masa Orde Lama.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya ternyata politik luar negeri Indonesia pernah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan dengan bergesernya sifat bebas aktif menjadi politik konfrontatif kepada Malaysia pada tahun 1963-1966, Politik konfrontatif ini dilancarkan karena Indonesia menolak pembentukan federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme baru yang didalangi oleh Inggris.

Jadi dapat disimpulkan hipotesis pertama yang menyatakan Jika landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah Pancasila dan UUD 1945 dan dasar hukum pelaksanaannya adalah Pancasila dan pidato Hatta dihadapan BP KNIP, maka Indonesia menjadi negara yang netral (non blok) dalam percaturan politik dunia tidak terbukti. Dan dapat dibenarkan sebagai berikut “jika landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah Pancasila dan UUD 1945 dan dasar hukum pelaksanaannya adalah Pancasila dan pidato Hatta dihadapan BP KNIP, maka Indonesia tidak akan melakukan politik konfrontatif terhadap Malaysia yang membuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menyeleweng dari landasan, dasar hukum dan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif”. Penyelewengan disebabkan karena Situasi politik dalam negeri yang didominasi oleh tiga kekuatan, yaitu PKI, Presiden Sukarno dan TNI-AD. Bagi Presiden Sukarno, menyerang Federasi Malaysia dapat menunjang tujuan politiknya untuk menciptakan suasana kritis, dramatik dan revolusioner dalam kehidupan politik.

---

<sup>29</sup> M Sabir . 1987. *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta : CV. Haji Masagung, hlm 27.

## BAB III

### LATAR BELAKANG KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA

#### A. Latar Belakang Pembentukan Federasi Malaysia

##### 1. Tujuan Pendirian Federasi Malaysia

Kata "aktif" dalam prinsip politik luar negeri yang seharusnya ditujukan untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia, diartikan sebagai aktif untuk berjuang secara konfrontatif sangat efektif dijadikan alat untuk melawan *Old Established Force* (Oldefo). Sehingga jelas, bahwa politik ini sama sekali tidak menunjang terwujudnya perdamaian. Lima bulan setelah berakhirnya sengketa Irian Barat dengan Belanda, secara resmi politik konfrontatif dikumandangkan kembali untuk menyerang pembentukan Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia itu sendiri dipelopori oleh pihak Malaya. Negara Malaya sebelumnya telah berdiri pada tahun 1957 lepas dari jajahan Inggris. Adapun wilayahnya meliputi: Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor dan Trengganu, serta Malaka dan Penang (yang kesemuanya ini disebut Persekutuan Tanah Melayu). Hubungan Indonesia dengan Malaya sejak negeri ini merdeka tidak begitu harmonis. Penyebabnya karena bentuk kemerdekaan Malaya yang masih dilindungi Inggris dan sifatnya yang terikat dalam Commonwealth, kecurigaan Indonesia terhadap negeri tetangganya ini semakin tebal dengan sikap absen Malaya terhadap masalah Irian Barat dan dukungannya terhadap pemberontakan PRRI. Akibatnya ketika pemimpin Malaya, Tengku Abdul Rahman, mengemukakan idenya tentang pembentukan Federasi Malaysia, maka

dengan segera ditentang oleh Indonesia. Alasannya karena ide pendirian federasi Malaysia dianggap berasal dari Inggris yang mempunyai maksud buruk terhadap Indonesia. Inggris dalam hal ini digambarkan sebagai suatu negara Oldefo yang akan menindas Indonesia yang merupakan kategori negara baru atau Nefo.

Sebenarnya, anggapan Indonesia tersebut tidak benar, karena gagasan pendirian federasi Malaysia dikemukakan sendiri oleh Tengku Abdul Rahman yang pada waktu itu menjadi pimpinan Malaya. Federasi yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah diusulkan oleh Tengku Abdul Rahman di depan para wartawan yang tergabung dalam *Foreign Journalists Association* pada tanggal 27 Mei 1961.<sup>30</sup> Kemudian pada tahun 1962 ditawarkan pula kepada wilayah Brunai agar bersedia menjadi anggota federasi. Sejauh ini keterlibatan Inggris terhadap pembentukan Federasi Malaysia belum dipermasalahkan. Akan tetapi, masalahnya menjadi lain ketika Tengku Abdul Rahman berkonsultasi dengan Perdana Menteri Inggris, McMillan, mengenai rencana pelaksanaan federasi pada pertengahan tahun 1962. Sejak itu timbul dugaan kuat dari pemerintah Indonesia, bahwa ide pembentukan federasi Malaysia berasal dari Inggris. Memang dalam sejarah Malaya pada tahun 1887 pernah ada seorang bangsawan Inggris bernama Lord Brassey yang menyarankan kepada *House of Lord* untuk membentuk persatuan daerah-daerah koloni Inggris di wilayah Asia Tenggara, namun usul ini ditolak. Kemudian pada tahun 1961 usul serupa diajukan lagi oleh Tengku Abdul Rahman, dan ternyata disetujui oleh pemerintah Inggris.

---

<sup>30</sup> Hidayat Mukmin. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*. Jakarta : Pustaka Harapan, hlm 35.

Menurut Tengku Abdul Rahman, Federasi Malaysia sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kependudukan yang tidak seimbang antara suku Melayu dengan suku Cina. Selain itu, pembentukan federasi ini juga ditujukan untuk mengatasi masalah ekonomi, politik dan pertahanan. Keinginan Tengku Abdul Rahman untuk membentuk federasi Malaysia terlihat dari ucapannya sebagai berikut: "*Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone. Sooner or later Malaya must have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapura, North Borneo, Brunai and Serawak*".<sup>31</sup>

Keinginan Tengku Abdul Rahman ini telah pula disetujui oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang menyatakan, bahwa penggabungan dengan Malaya merupakan dasar yang memungkinkan pembangunan Singapura yang stabil. Keikutsertaan wilayah Kalimantan Utara milik Inggris dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan, karena suatu keuntungan lain akan diperoleh, yaitu penarikan dominasi Inggris dengan mudah dari jajahannya di Kalimantan Utara yang meliputi Sabah, Serawak dan Brunai.<sup>32</sup>

Untuk merealisasi gagasannya, pada akhir tahun 1961 Tengku Abdul Rahman mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri McMillan di London. Dari perundingan tersebut dihasilkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Inggris dan Malaya menyetujui penggabungan antara Singapura dengan Malaya.

---

<sup>31</sup> Anak Agung Gde Agung. *op. cit* hlm 447. " Malaya, sekarang, sebagai satu bangsa menyadari bahwa dia (Malaya) tidak bisa berdiri sendiri. Cepat atau lambat Malaya harus memiliki kesepahaman dengan Inggris dan orang-orang di wilayah Singapura, Borneo Utara, Brunai dan Serawak".

<sup>32</sup> Legge, J.D. 1985. *Sukarno A Political Biography* , terjemahan tim PSH. *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta : Sinar Harapan, hlm 413.

2. Inggris dengan Malaya akan mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang pembentukan Federasi Malaysia dengan bantuan sebuah komisi.
3. Persetujuan pertahanan antara Inggris dengan Malaya akan diperluas, sehingga meliputi seluruh daerah Federasi Malaysia.<sup>33</sup> Hasil perundingan ini menunjukkan, bahwa Inggris mendukung sepenuhnya rencana pendirian Federasi Malaysia.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu alasan penggabungan dengan daerah jajahan Inggris di Kalimantan Utara adalah untuk menjamin perimbangan penduduk Melayu dengan Cina. Hal ini dilakukan, karena kenyataannya orang-orang Cina memegang peranan penting di bidang ekonomi. Tanpa Federasi Malaysia, perimbangan penduduk Melayu-Cina-India dan lain-lain di Malaya adalah 3.620.000: 2.670.000: 942.000 orang. Kemudian jika terjadi penggabungan antara Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak akan menjadi 4.707.000: 4.302.000: 1.178.000 orang. Angka tersebut jika dihitung persentasinya adalah 46,2% : 42,2% : 11,6%.<sup>34</sup> Perhitungan ini belum termasuk wilayah Brunai yang diharapkan akan semakin menambah jumlah suku Melayu.

Secara politis, setelah tercapai perimbangan, maka partai politik yang menentukan kebijaksanaan pemerintah tidak dikuasai oleh golongan Cina dan komunisme dapat dibendung. Tidak dapat disangkal, bahwa Tengku Abdul Rahman juga sangsi terhadap negara tetangga dekatnya, yakni Indonesia yang telah dipengaruhi komunis, terutama pada zaman Nasakom.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hidayat Mukmin *op. cit* hlm 87-88.

<sup>34</sup> J.A.C. Mackie. 1974. *Konfrontasi the Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, hlm 37.

<sup>35</sup> A.H. Nasution. 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6 Masa Kebangkitan Orde Baru*. Jakarta : CV Haji Masagung, hlm10.

Alasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi memperhitungkan bahwa Malaya yang hanya kaya dengan karet, timah dan kopra, dalam federasi nanti akan semakin kokoh ekonominya dengan dukungan Singapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa, serta Brunai yang kaya dengan minyak.<sup>36</sup>

Kemudian dari segi eksternal terutama dari segi pertahanan keamanan, penggabungan daerah-daerah tersebut dalam suatu federasi akan dapat menyederhanakan sistem pertahanan keamanan. Caranya dengan mengelola federasi secara bersama sebagai suatu unit strategik. Federasi akan tetap berada dalam lingkungan Persemakmuran Inggris, dan Inggris akan tetap memberikan perlindungan militer, baik untuk menanggulangi ancaman komunis, maupun ancaman lain.<sup>37</sup> Dengan demikian gagasan pembentukan Federasi Malaysia ini sebetulnya merupakan gagasan yang positif dan cukup rasional.

Inggris sangat mendukung gagasan ini, karena secara tidak langsung juga memperoleh keuntungan dari proyek ini. Di Malaya Inggris memiliki tambang timah dan perkebunan karet, di Singapura mempunyai beberapa perusahaan dagang dan di Brunai memiliki perusahaan minyak tanah. Kemudian, jika dipandang dari sudut pertahanan, daerah Malaysia adalah salah satu mata rantai penting bagi pertahanan blok Barat untuk membendung arus komunis. Selain itu, Tengku Abdul Rahman dikenal sebagai sosok yang pro Barat, sehingga sebuah federasi yang dikemudikannya akan menjamin tetap pro Barat.

Indonesia sebagai negara dekat, telah diajak berkonsultasi oleh Inggris pada tahun 1961. Konsultasi ini diwakili oleh Lord Selkirk, komisaris jenderal Inggris

---

<sup>36</sup> Hidayat Mukmin, *loc. cit.*

<sup>37</sup> *Idem.*

untuk Asia Tenggara yang berpangkalan di Singapura. Dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia menyatakan penghargaannya kepada Inggris yang ingin melepaskan koloninya di Kalimantan Utara. Mengenai cara memerdekakannya terserah kepada Inggris dan rakyat yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia bahkan mengucapkan selamat kepada Malaya jika rencana pembentukan Federasi Malaysia berhasil.<sup>38</sup> Sikap yang lunak ini dimungkinkan karena Indonesia sedang mencari dukungan Barat untuk perjuangan membebaskan Irian Barat.

Sementara itu, sebagai kelanjutan pembicaraan antara pihak Malaya dan Inggris, dibentuklah Komisi Cobbold yang bertugas menjajaki kemungkinan pembentukan Federasi Malaysia. Komisi ini dipimpin oleh Lord Cobbold yang beranggotakan beberapa orang dari Inggris dan Malaya. Hasil penyelidikan komisi kemudian dimuat dalam *Report of the Commission of Inquiri, North Borneo and Serawak* pada tahun 1962. Dari laporannya diketahui, bahwa  $\frac{1}{3}$  menyetujui tanpa syarat,  $\frac{1}{3}$  lain menyetujui dengan syarat agar kepentingan daerah terjamin, sedangkan yang  $\frac{1}{3}$  lagi terbelah menjadi dua, yaitu ingin tetap di bawah Inggris dan sebagian ingin memperoleh kemerdekaan dahulu sebelum bergabung dalam federasi.<sup>39</sup> Dengan demikian disimpulkan, bahwa mayoritas rakyat menyetujui untuk bergabung dalam Federasi Malaysia. Maka diputuskan bahwa federasi akan dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1963 dengan persetujuan yang telah ditandatangani oleh wakil Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak. Brunai yang menurut rencana akan menjadi anggota ke-5 tidak ikut menandatangani karena belum diperoleh persetujuan yang dapat diterima kedua

<sup>38</sup> Michael Leifer. *op. cit*, hlm113.

<sup>39</sup> N.J. Ryan. 1969. *The Making of Modern Malaysia and Singapore, a History from Earliest Times to 1966*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, hlm 263.

belah pihak. Sampai sejauh ini pemerintah Indonesia belum memberikan reaksi keras terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia.

Sampai suatu ketika di Bulan Desember tahun 1962 muncul pemberontakan di Brunai yang dipimpin oleh Azahari. Azahari berusaha memproklamkan berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang meliputi Sabah, Serawak dan juga Brunai. Azahari yang memimpin Partai Rakyat di Brunai termasuk dalam golongan sayap kiri dan merupakan partai politik yang terkuat. Sebenarnya ia masih loyal, kepada Sultan Brunai, hanya saja partainya menolak penggabungan dalam Federasi Malaysia dan bertekad untuk berjuang mencari kemerdekaan sendiri. Munculnya pemberontakan di Brunai membuat pemerintah Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia, dengan alasan bahwa secara prinsipil hal itu bertentangan dengan politik luar negeri yang anti-imperialisme-kolonialisme. PKI merupakan satu-satunya oposisi terbuka yang dikemukakan sendiri oleh komite sentralnya. Akibatnya, walaupun pemberontakan di Brunai dengan cepat dapat dipadamkan oleh Inggris, tetapi peristiwanya itu sendiri telah menimbulkan keraguan bagi pemerintah Indonesia terhadap kesediaan penduduk untuk masuk dalam Federasi Malaysia. Selain itu, pendirian federasi ini juga dianggap akan mengancam kelangsungan revolusi Indonesia. Dalam sebuah pidatonya di Sekolah Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1963, Presiden Sukarno menyatakan: "Dibentuknya Federasi Malaysia oleh Tengku Abdul Rahman dan Inggris bagi kita adalah merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia, konfrontasi terhadap keselamatan kita dan terhadap cita-cita yang sejak lama hendak kita laksanakan".<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hidayat Mukmin. *op. cit*, hlm 91.

Menjadi jelas bahwa pembentukan Federasi Malaysia dianggap akan mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan menghambat revolusi yang sedang dilaksanakan oleh Indonesia.

Situasi politik dalam negeri juga ikut mendorong dilaksanakannya politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia. Sekali lagi, bahwa situasi politik dalam negeri pada masa itu didominasi oleh tiga kekuatan tangguh, yaitu PKI, Presiden Sukarno dan TNI-AD. Bagi Presiden Sukarno, selain kecenderungan pribadi setelah kemenangannya atas Irian Barat (dengan mengatakan bahwa ia merasa diobsesi oleh romantisme revolusi), maka semangat revolusioner untuk menyerang Federasi Malaysia dapat menunjang tujuan politiknya untuk menciptakan suasana kritis, dramatik dan revolusioner dalam kehidupan politik. Selain itu juga untuk menguatkan semangat romantika revolusi yang harus dianut oleh seluruh kelompok dalam masyarakat. Lebih dari itu, mengingat kekuatan internal yang sangat rapuh, yang menyebabkan stagnasi kebijaksanaan dalam negeri, maka bidang yang paling berhasil dalam mengejar "romantika revolusi" adalah bidang kebijaksanaan luar negeri.

PKI juga sangat antusias menentang pendirian "Federasi Malaysia, karena khawatir dengan terwujudnya federasi tersebut, maka kekuatan komunis di Indonesia akan mengalami kehancuran.<sup>41</sup> Sedangkan pihak TNI-AD justru mengkhawatirkan, bahwa dengan terbentuknya federasi, maka pengaruh komunis Cina semakin besar. Anggapan ini memang berlawanan dengan pemikiran dari Tengku Abdul Rahman maupun para pembesar Inggris. Untuk meredakan suasana

---

<sup>41</sup> Frans S Fernandes. 1988. *Hubungan internasional dan Peranan Bangsa Indonesia, Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta : Dekdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, hlm 158.

dan meluruskan pengertian yang salah sehubungan dengan pembentukan Federasi Malaysia, Presiden Sukarno dan Tengku Abdul Rahman mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang, pada awal tahun 1963. Kesediaan Jepang sebagai tempat perundingan merupakan keterlibatan pertama yang berdampak positif, setelah cukup lama absen dalam percaturan politik di Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Pasifik. Dari pertemuan ini mereka bersepakat untuk memupuk kembali persahabatan, saling menghormati dan tidak saling menuduh. Sebagai kelanjutannya, maka diadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Manila, Philipina, yang dihadiri oleh wakil dari Indonesia, calon Federasi Malaysia dan Philipina. Philipina juga menentang pembentukan Federasi Malaysia dengan alasan, bahwa Sabah yang merupakan bekas jajahan Sultan Sulu adalah miliknya. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan, bahwa pihak Indonesia maupun Philipina tidak keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia, asalkan sesuai dengan hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat yang bersangkutan melalui penyelidikan PBB. Keputusan lain disebutkan pula perlunya pengembangan lebih lanjut gagasan Presiden Philipina, Diosdado Macapagal, untuk membentuk Maphilindo.<sup>42</sup> Pertemuan tingkat menteri luar negeri selanjutnya diteruskan dengan pertemuan atau konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh pimpinan ketiga negara di Manila pada bulan Agustus 1963. Secara garis besar, pertemuan tingkat tinggi ini hanya mempertegas kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan tingkat menteri luar negeri sebelumnya.

## 2. Penyelidikan Misi PBB

---

<sup>42</sup> Departemen Penerangan RI. 1964. *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*. Jakarta : Departemen Penerangan RI, hlm 73-77.

Sesuai dengan hasil pertemuan tingkat tinggi Manila, Sekretaris PBB, U Thant, kemudian mengirimkan misi ke Serawak dan Sabah untuk meneliti kesediaan rakyat bergabung dalam Federasi Malaysia. Pimpinan misi dijabat oleh Michelmores dari Amerika Serikat, dengan anggota-anggotanya dari Cekoslovakia, Argentina, Ceylon, Ghana, Pakistan, Jepang, Yordania dan Brazilia. Terdapat pula beberapa peninjau dari Indonesia, Malaya dan Philipina. Dengan adanya misi PBB, maka pembentukan federasi ditunda dari hari yang sebelumnya telah ditentukan, yakni tanggal 31 Agustus 1963. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan menyambut baik Federasi Malaysia, jika berdasarkan penyelidikan PBB, Serawak dan Sabah memang bersedia bergabung tanpa paksaan.

Tanggal 26 Agustus 1963 Utusan U Thant memulai penyelidikannya. Hasil penyelidikan ini akan diumumkan pada tanggal 14 September 1963. Akan tetapi, sebelum misi PBB mengumumkan hasilnya secara resmi, suatu kesalahan fatal dibuat oleh pihak "Malaysia". Kesalahan itu adalah dieluarkannya pengumuman pada tanggal 29 Agustus 1963, bahwa Federasi Malaysia akan dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Indonesia segera mengajukan protes, karena hasil misi PBB belum diketahui secara pasti, tetapi tanggal pembentukan federasi sudah diumumkan. "Malaysia" dianggap telah menyalahi hasil Pertemuan Manila. Terhadap pengumuman itu, kata Kahin, Presiden Sukarno telah dihadapkan pada "sudut penghinaan".<sup>43</sup> Kejadian ini memberikan dasar alasan baru untuk tidak menerima Federasi Malaysia. Penolakan ini tetap tidak dicabut, walaupun U

---

<sup>43</sup> Legge, J.D. *op. cit.* hlm 426.

Thant akhirnya pada tanggal 14 September tahun 1963 mengumumkan hasil misi, bahwa "tidak ada keraguan mengenai keinginan mayoritas rakyat Kalimantan Utara untuk bergabung dalam Pederasi Malaysia.<sup>44</sup> U Thant juga berusaha menjernihkan suasana dengan mengeluarkan pernyataan, bahwa tindakan dari pihak "Malaysia" telah membuat salah pengertian, dan itu harap dimaklumi. Namun, hal ini tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan suatu tuduhan lain dikemukakan lagi, yakni mengenai pengiriman peninjau-peninjau yang hadir selama penelitian PBB. Indonesia meminta hak mengirimkan 10 orang, tetapi Inggris hanya memberikan 4 visa. Dalam Perjanjian Manila sendiri tidak tercantum jumlah peninjau yang harus dikirim ke Serawak dan Sabah. Peristiwa ini dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu tindakan yang tidak jujur. Sehingga pihak Indonesia memandang latar belakang pendirian federasi Malaysia memiliki maksud yang tidak baik.

Berkaitan dengan pengumuman pembentukan federasi Malaysia yang terlihat tergesa-gesa, Jenderal Nasution pernah mendapat laporan, bahwa Inggris merasa Indonesia telah mencampuri urusan yang termasuk dalam kedaulatannya. Di lain pihak, Tengku Abdul Rahman sejak semula telah mengatakan bahwa negerinya bukan "boneka Inggris". Hubungannya dengan Inggris memang dekat, karena negerinya merasa berterima kasih kepada Inggris yang dianggap telah mempercepat kemajuan dalam perjuangan kemerdekaan.

Terlepas dari sikap penolakan Indonesia maupun Philipina, Federasi Malaysia akhirnya tetap terbentuk pada tanggal 16 September 1963. Anggotanya

---

<sup>44</sup> Hidayat Mukmin. *op. cit*, hlm 95.

adalah Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Brunai yang pada awalnya direncanakan ikut bergabung ternyata mengundurkan diri karena alasan tertentu. Menurut pemerintah Indonesia, diproklamasikannya Federasi Malaysia dianggap sebagai iktikad buruk terhadap bangsa dan negara Indonesia. Didorong oleh sikap revolusioner di dalam negeri, maka sejak tanggal 16 September 1963 itu pula secara resmi di kumandangan konfrontasi "mengganyang Malaysia".<sup>45</sup>

## **B. Penolakan Indonesia Terhadap Federasi Malaysia : Suatu Pertentangan Ideologi**

### **1. Pertentangan Militan antara Prinsip Anti-Imperialisme Kolonialisme dengan Neokolonialisme**

Dari berbagai sebab yang mendorong dilangsungkannya konfrontasi terhadap Malaysia, konflik ideologilah yang paling menonjol. Terlepas dari sifat ideologi yang tidak berbentuk nyata dan karenanya juga tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi harus diingat, bahwa ideologi selalu berkaitan dengan kepentingan nasional yang lain, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan militer. Adapun menurut kamus politik, yang dimaksud dengan ideologi politik adalah himpunan nilai, ide atau norma-norma kepercayaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, seperti halnya di Benua Asia dan Afrika, ideologi masih menempati posisi penting dalam skala prioritas

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 96.

kepentingan nasional. Demikian pula dengan Indonesia. Ideologi yang terbentuk pada masa revolusi merebut kemerdekaan sangat dijunjung tinggi pada masa pasca revolusi. Ideologi ini pula yang ingin dipertahankan pada tata hubungan antar bangsa di dunia pada sekitar satu dasawarsa setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang dicapai dengan susah payah melalui perjuangan yang berat menimbulkan perasaan anti imperialisme kolonialisme yang tebal sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Perasaan anti imperialisme kolonialisme ini kemudian dijadikan salah satu prinsip dari politik luar negeri Indonesia. Dengan semangat anti-penjajahan melawan Belanda dalam revolui fisik dan Trikora, kemudian dengan politik luar negeri yang didasarkan atas pidato Presiden Sukarno yang berjudul "Membangun Dunia Kembali" yang bersumberkan konsep dialektika, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Revolusi Indonesia belum selesai. Bangsa Indonesia merasa masih dikepung oleh musuh-musuh imperialis-kolonialis dari luar negeri, antara lain oleh Federasi Malaysia dan Inggris. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai salah satu buktinya. Dalam salah satu amanatnya di Bogor, Presiden Sukarno menyatakan sebagai berikut:

"Dus Malaysia ini dipertahankan oleh seluruh imperialisme, dipertahankan oleh Inggris; dipertahankan oleh Australia; dipertahankan oleh Zelandia Baru; dipertahankan oleh Amerika, bahkan ditambah lagi oleh simpati dari negara-negara Nekolim (Neokolonialisme-imperialisme) yang lain. Djadi, in and event of war, kita mengetahui, musuh itu tidak akan datang from the North, musuh itu yaitu Nekolim jang akan mempertahankan life line....".<sup>46</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembentukan Federasi Malaysia oleh Presiden Sukarno dianggap sebagai perwujudan neokolonialisme-

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 73.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

47

imperialisme yang menjadi bagian dari gerakan pengepungan terhadap revolusi Indonesia. Dalam kerangka pandangannya, posisi Indonesia sebagai Nefo akan terjepit di antara musuh-musuh dari Oldefo yang melindunginya.

Pada kesempatan lain, Presiden Sukarno menekankan kembali alasannya menentang pembentukan Federasi Malaysia: "Mengapa kami menentangnya? Karena Malaysia merupakan manifestasi neokolonialisme. Kami tidak ingin mempunyai neokolonialisme di sekitar kami. Kami menganggap Malaysia sebagai pengepungan RI. Malaysia merupakan produk pikiran dan usaha neokolonialisme...."<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas dapat pula dikatakan, bahwa dalam pengertian sosial, Federasi Malaysia yang lahir tanpa melalui revolusi dianggap akan hadir sebagai suatu negara yang konservatif-aristokrat pembela kepentingan Inggris.

Tekad untuk menghapus setiap penjajahan dengan segala bentuk dan manifestasinya memang merupakan suatu sikap yang terpuji. Hanya saja praktek pelaksanaannya yang menganut garis keras dan konfrontatif menjadi tidak sesuai dengan politik luar negeri yang telah ditetapkan. Untuk melegalkan cara ini, Presiden Sukarno memberi keterangan, bahwa memang revolusi bukan suatu hal yang ramah, revolusi terpaksa mengenal "garis pemisah" antara kawan dan lawan. Konsep ini pula yang digunakan untuk mempertentangkan antara *New Emerging Force* (Nefo) dengan *Old Established force* (Oldefo).

Jika diteliti lebih lanjut, maka cara yang dipergunakan oleh pemerintah Indonesia mirip dengan cara dan taktik yang digunakan kaum komunis, yakni

---

<sup>47</sup> Michael Reifer. *op. cit.*, hlm 116.

mengandalkan kekerasan, revolusioner dan radikal. Politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia ini kemudian dimanfaatkan PKI untuk mencapai kepentingannya.

## 2. Pertentangan antara Ideologi Komunis dan Liberalis

Arah politik luar negeri Indonesia yang semakin gencar menyerang Federasi Malaysia dimanfaatkan oleh blok komunis yang bernaung dalam PKI untuk menghancurkan "benteng Barat" di Malaysia. Karena itulah PKI sangat antusias meningkatkan konfrontasi. PKI memperhitungkan secara seksama momentum suasana revolusioner dan mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan situasi yang demikian. Anggapan bahwa Federasi Malaysia suatu "proyek neokolonialisme" yang mengancam keselamatan Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep pemikiran strategik PKI. Demikian pula seluruh kegiatan untuk "*mengganyang Malaysia*" implisit terkandung dalam skenario politik dan strategi dalam rangka kup September 1965.<sup>48</sup> karena dengan lemahnya kekuatan pemerintah yang tersedot dalam peristiwa konfrontasi membuat PKI semakin mudah melancarkan usaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Suara PKI sebagai partai yang cukup banyak pendukungnya pada waktu itu tidak dapat diabaikan oleh Presiden Sukarno. Apalagi beberapa tokoh PKI telah berhasil menduduki jabatan penting. Dalam formasi kabinet tahun 1963, Subandrio yang simpatisan PKI menjabat sebagai wakil perdana menteri I, D.N Aidit menjabat sebagai salah satu wakil ketua MPRS, dan Lukman menjabat sebagai salah satu wakil ketua DPR-GR.<sup>49</sup> Beberapa tokoh ABRI-di pusat maupun

---

<sup>48</sup> Hidayat Mukmin. *op. cit*, hlm 86.

<sup>49</sup> Deppen RI. *op. cit*, hlm 154-158.

daerah banyak juga yang merupakan simpatisan PKI, seperti Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara (Pangau). Selain itu juga Brigadir Jenderal Suparjo yang merupakan panglima komando tempur Kalimantan Barat untuk menghadapi konfrontasi dengan Federasi Malaysia.<sup>50</sup> Di sisi lain, dukungan subyektif Presiden Sukarno terhadap PKI yang dinilainya sebagai partai yang paling terorganisir baik dan bersifat revolusioner, semakin membawa kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia seiring dengan kepentingan golongan komunis.

Selama berlangsungnya sistem ketatanegaraan Demokrasi Terpimpin, para pengamat politik telah banyak memperoleh petunjuk, bahwa kebijaksanaan pemerintah Indonesia pada periode tersebut berangsur-angsur bergeser ke kiri. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, walaupun Presiden Sukarno yang menjadi pimpinan, namun dalam bayangannya nampak tangan-tangan PKI ikut mengemudikan pemerintahan. Pertentangan golongan komunis terhadap golongan liberalis dalam konteks konfrontasi terhadap Federasi Malaysia semakin nampak jelas. Beberapa berita dalam Surat Kabar Harian Rakjat yang merupakan milik PKI, secara implisit mendorong pemerintah Indonesia agar meneruskan politik "pengganyangan Malaysia" secara hebat. Aidit yang menjabat sebagai ketua umum PKI bahkan mengancam jika pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Malaysia secara kompromistis.<sup>51</sup>

Terhadap pemberontakan di Brunai yang dipimpin oleh Azahari, oleh Surat Kabar Harian Rakjat juga diserukan agar diberi dukungan. Menurut Muhaimin

---

<sup>50</sup> Djanmwar. 1986. *Mengungkap Penghianatan/Pemberontakan G.30 S/PKI*. Bandung : CV Yrama, hlm 174-189.

<sup>51</sup> Hatta dan Ide Anak Agung gde Agung. 1987. *Surat-menyurat Hatta dan Anak Agung : menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur*. Jakarta : Sinar Harapan, hlm 45

Jahja, PKI memainkan peranan penting dalam pemberontakan di Brunai. Sejak akhir tahun 1961, PKI telah menjalin hubungan yang erat dengan gerakan komunis radikal "Partai Rakyat" untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Sejak itu PKI mentraining secara khusus para anggota "Partai Rakyat".<sup>52</sup> Karena tindakan PKI inilah timbul pendapat, bahwa sebelum pecahnya pemberontakan di Brunai, kaum pemberontak secara diam-diam telah mendapat bantuan dari Indonesia.<sup>53</sup>

Dalam kenyataannya pemerintah Indonesia juga tidak mengakui hasil penyelidikan PBB, sehingga terlihat bahwa konfrontasi terhadap Federasi Malaysia juga mengandung dimensi pertentangan antara ideologi komunis dengan liberalis. Di sisi lain, Malaysia dengan dukungan Inggris mempunyai anggapan, bahwa musuh mereka selain komunis yang datang dari Utara, juga komunis yang datang dari Selatan, yaitu dari Indonesia yang pemerintahannya didukung penuh oleh PKI. Tengku Abdul Rahman juga pernah mengatakan bahwa bahaya yang paling ia takuti adalah infiltrasi komunis. Pembentukan Federasi Malaysia itu sendiri tidak dapat disangkal, walaupun secara tidak langsung, salah satu tujuannya adalah untuk membendung aliran komunis, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.

Menurut Anak Agung (tokoh yang banyak terlibat dalam bidang politik luar negeri), PKI telah memberikan tekanan yang keras agar Presiden Sukarno tidak menempuh jalan damai. Tujuan PKI sudah jelas, bahwa dengan situasi

---

<sup>52</sup> Partai Rakyat adalah partai yang dibentuk oleh PKI sebagai gerakan radikal menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia. Anggota partai ini adalah masyarakat kelas bawah yang sebagian besar menjadi petani. Partai ini mengikrarkan diri sebagai gerakan radikal komunis.

<sup>53</sup> Yahya Muhaimin. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 150-151.

konfrontasi akan dapat dipertahankan suasana radikal anti-Barat. Jika Federasi Malaysia dapat digagalkan berarti juga hancurnya "benteng" Barat. Selain itu PKI juga akan mempunyai kesempatan untuk menghasut rakyat. Kemudian secara perlahan-lahan Indonesia akan mengalami kehancuran, baik dari dalam, maupun dari luar. Dari dalam karena perekonomian yang terbengkalai, dan dari luar karena kekuatan Indonesia yang jauh dari Federasi Malaysia yang didukung Inggris dan pakta pertahanan ANZUS. Di atas puing-puing itulah PKI kemudian mendirikan rezim komunis di Indonesia.<sup>54</sup>

Pada tahun 1964, Amerika Serikat yang khawatir terhadap pengaruh komunis di Indonesia, mencoba mengusahakan jalan damai. Tetapi, pelaksanaan diplomasi damai inipun tidak lepas dari oposisi dan kecaman PKI, sehingga mengalami kegagalan. Atas kegagalan tersebut, Subandrio yang merupakan tangan kanan Presiden Sukarno dan simpatisan PKI menyatakan, bahwa konfrontasi terhadap Federasi Malaysia akan terus berlangsung, dan bahkan harus diintensifkan.<sup>55</sup> Subandrio yang berjiwa hyper-oportunis (sangat senang mencari kesempatan) telah bersekutu dengan PKI. Ia bercita-cita akan menggantikan kedudukan presiden, seandainya Presiden Sukarno meninggal.<sup>56</sup> Dengan alasan untuk meningkatkan kekuatan, PKI mendesak agar pemerintah mempersenjatai kaum buruh dan tani sebagai angkatan ke-5. Gagasan untuk mempersenjatai para buruh dan tani ini sangat ditentang oleh pihak Angkatan Bersenjata dan Presiden Sukarno-pun ternyata juga masih ragu-ragu untuk menyetujuinya.

---

<sup>54</sup> Hatta dan Anak Agung. *op. cit*, hlm 61.

<sup>55</sup> Michael Liefer. *op. cit*, hlm 143.

<sup>56</sup> Hatta dan Anak Agung. *op. cit*, hlm 91.

Untuk meningkatkan konfrontasi terhadap blok Barat pada umumnya, PKI mendorong rakyat dan massanya untuk merusak kantor-kantor konsultan dan informasi Amerika Serikat yang berakibat ditutupnya kantor dinas informasi. "Merasa mendapat angin", partai ini semakin melancarkan ofensif revolusioner baik di dalam negeri maupun dalam politik luar negeri. Propagandanya terlihat dari tulisan-tulisan di tembok yang dibuat PKI yang berbunyi: "*Hancurkan Nekolim !*", "*Hidup Sukarno*", "*Hidup Nasakom*" dan "*Hidup PKI!*". Sebagai puncaknya terlihat ketika pemerintah Indonesia membentuk aliansi dengan negara-negara komunis lainnya yang berupa poros Jakarta-Hanoi-Pnom Penh-Peking-Pyong Yang, yang selanjutnya sering disebut dengan poros Jakarta-Peking-Pyong Yang.

Dari berbagai gejala dan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan, bahwa peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia juga dapat dilihat sebagai pertentangan antara ideologi komunis dengan liberalis. Ideologi komunis diwakili oleh PKI yang berhasil membelokkan politik luar negeri Indonesia ke blok komunis, Ketika terjadi konfrontasi ini, Presiden Sukarno lebih mendekati diri kepada negara-negara komunis. Di lain pihak, politik kon-frontasi Indonesia terhadap Malaysia dapat juga dilihat sebagai perlawanan terhadap ideologi liberalis yang oleh pemerintah Indonesia diidentifikasi sebagai negara-negara yang bersifat Nekolim (neokolonialisme-imperialisme).

## **C. Provokasi Mengganyang Malaysia.**

### **1. Provokasi Awal dan Diplomasi yang Gagal**

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53

Bersamaan dengan dikeluarkannya seruan resmi "mengganyang Malaysia" pada tanggal 16 September 1963, serentak rakyat, massa PKI dan bahkan Presiden Sukarno melakukan tindakan provokatif terhadap Federasi Malaysia. Tindakan provokasi ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan menantang, memancing dan membangkitkan kemarahan pihak lawan. Lebih jauh, pihak yang melakukan tindakan provokatif menyadari, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan pertumpahan darah.

Tindakan awal yang dilakukan adalah pengerahan massa besar-besaran untuk berdemonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Inggris. Gedung Kedutaan Besar Inggris bahkan dibakar oleh rakyat yang tidak terkendalikan. Tindakan ini dibalas oleh demonstrasi serupa terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur dan pemutusan hubungan diplomatik kedua belah pihak. Akibatnya, kedua negarapun semakin tenggelam ke dalam arena permusuhan. Selanjutnya, konfrontasi terhadap Malaysia ini diperluas tidak hanya di bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan militer. Pada tanggal 21 September 1963, Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/ Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengeluarkan surat perintah no. 1/ KOTOE yang berisi perintah untuk memutuskan semua hubungan lalu lintas perekonomian dengan daerah-daerah yang menamakan diri Malaysia, terutama Malaya dan Singapura, serta "*dedolarisasi*" di Kepulauan Riau. Dibandingkan konfrontasi di bidang politik dan ekonomi dapat diketakan, bahwa konfrontasi di bidang militer mengambil skala yang lebih terbatas. Tidak dilakukan penempatan kesatuan secara besar-besaran di perbatasan, selain hanya penempatan pasukan-pasukan reguler secara terbatas.

Justru yang aktif dalam aksi pengganyangan ini adalah para sukarelawan yang pada saat dicetuskannya Dwi-komando Rakyat atau Dwikora mencapai jumlah 2,1 juta orang.<sup>57</sup> Jumlah sukarelawan sebesar itulah yang diinginkan PKI untuk dipersenjatai sebagai angkatan ke-5. Kegiatan provokasi ini juga dilakukan melalui pers yang berupa kecaman, ancaman dan saling tuduh-menuduh.

Politik "ganyang Malaysia" menggoyahkan stabilitas keamanan Asia Tenggara. RRC menyatakan dukungannya terhadap Indonesia. Di pihak lain, Amerika Serikat merasa khawatir, karena bila terjadi keterlibatan Inggris, tentu akan melibatkan juga Australia dan Selandia Baru. Itu berarti Amerika Serikat sebagai anggota pakta pertahanan Australia, New Zeland, United State (ANZUS) kemungkinan besar akan terlibat pula. Bila hal ini terjadi, wilayah Asia Tenggara akan menjadi kancah peperangan antara Indonesia yang didukung RRC berhadapan dengan kekuatan blok Barat. Lain daripada itu, tidak mustahil Uni Soviet akan juga ikut campur. Tindakan Indonesia ini berarti telah melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif. Karena dalam politik luar negeri bebas aktif terdapat prinsip untuk tidak menambah ketegangan dunia berkaitan dengan situasi Perang Dingin yang sedang berlangsung.

Sedikit demi sedikit pengiriman gerilyawan ke wilayah Kalimantan Utara ditingkatkan. Tetapi, kenyataannya usaha ini tidak banyak mendatangkan hasil, karena pasukan Inggris selalu berhasil menghadang pasukan Indonesia. Bantuan Inggris kepada Federasi Malaysia, sebagaimana bantuannya kepada bekas koloni Inggris yang lain adalah berdasarkan suatu perjanjian pertahanan Inggris-

---

<sup>57</sup> Hidayat Mukmin. *op. cit*, hlm 97.

Malaysia. Ketika federasi terbentuk, sisa-sisa pasukan Inggris dan Australia hanya tinggal 2000 orang. Namun, ketika Indonesia melancarkan konfrontasinya secara fisik, maka jumlah pasukan ditambah hingga mencapai 50.000 orang.<sup>58</sup>

Pada awalnya, Uni Soviet kurang berminat terhadap berlangsungnya politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Ini merupakan suatu hal yang sangat berbeda dalam konteks pelaksanaan konfrontasi atas Irian Barat. Salah satu faktor yang menyebabkan keenggannya untuk mendukung politik konfrontasi adalah kekecewaan negeri ini terhadap perkembangan keberpihakan PKI dan pemerintah Indonesia terhadap RRC yang merupakan mitra imbangnya. Dengan demikian, satu-satunya pendukung Indonesia selain RRC adalah Philipina, dengan catatan, bahwa dukungannya pun tidak sepenuh hati. Dukungan Philipina hanya berdasarkan keinginan pribadi untuk memperoleh daerah Sabah yang dianggap masih merupakan wilayahnya. Meskipun menentang Federasi Malaysia, tetapi Philipina berusaha untuk tidak melakukan konfrontasi militer.

Karena konfrontasi yang terus meningkat, maka Amerika Serikat kembali berusaha mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai. Robert Kennedy dikirimkan sebagai utusannya untuk meredakan konfrontasi. Kedatangan Robert Kennedy ini mengingatkan pada peranan yang pernah ia lakukan pada beberapa tahun sebelumnya, yakni ketika ia menjadi mediator dalam masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Pada awal tahun 1964 utusan dari Amerika Serikat ini bertemu dengan wakil dari Indonesia maupun dari Federasi Malaysia di Tokyo, Jepang. Setelah itu Robert Kennedy menemui Tengku Abdul Rahman

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 86.

dan Presiden Sukarno. Dalam suatu pertemuan di Jakarta, berhasil disepakati kerangka persetujuan gencatan senjata, walaupun pemerintah Indonesia masih tetap mempertahankan politik "ganyang Malaysia". Untuk merealisasi persetujuan gencatan senjata, Perdana Menteri kedua negara kemudian mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Pebruari 1964. Akan tetapi, ternyata hasil dari pertemuan di Bangkok tetap tidak dapat menyelesaikan masalah secara damai, karena kedua belah pihak saling berbeda pendapat. Federasi Malaysia mengajukan syarat agar pasukan gerilya dan kesatuan lainnya ditarik dari wilayahnya. Sebaliknya, Indonesia tetap berkehendak bahwa gencatan senjata bukan berarti penarikan gerilyawan dari posisi semula.

Selain dari utusan Amerika Serikat, pemimpin Kamboja, Norodom Sihanouk, ikut mengusahakan penyelesaian secara damai. Kemudian, Presiden Philipina, Diosdado Macapagal, juga mensponsori pertemuan segitiga antara wakil Indonesia, Malaysia, dan Philipina yang bertempat di Tokyo. Tetapi, kedua usaha ini tidak berhasil karena terbentur dengan prasyarat-prasyarat yang sama dalam pertemuan di Bangkok. Usaha mencari jalan damai yang gagal ini ternyata semakin membawa kerugian bagi Indonesia. Ketika konfrontasi secara militer ditingkatkan, Philipina tidak menyetujuinya. Front bersama yang dibentuk dengan Philipina untuk menentang Federasi Malaysia pun semakin melemah. Ini terbukti dengan perubahan sikap pemerintah Philipina yang menyetujui pertukaran pejabat konsuler antara Kualalumpur dengan Manila untuk merintis hubungan damai dengan Federasi Malaysia. Dengan demikian, pendukung Indonesia pun berkurang. Hanya RRC yang merupakan pendukung setia politik

konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sikap Pemerintah Philipina yang mulai berubah, menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Di sisi lain, kekecewaan terhadap usaha Amerika Serikat yang tidak menghasilkan sesuatu yang menguntungkan Indonesia, seperti halnya pada masalah Irian Barat, akhirnya menimbulkan kemarahan besar pada diri Presiden Sukarno. Ungkapan kemarahan ini ditujukan kepada Amerika Serikat yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, "*Go to hell with your aid ! ! !*". Maka, suatu babak baru dibuka, yakni konfrontasi secara resmi juga ditujukan kepada Amerika Serikat.<sup>59</sup>

## 2. Peningkatan Provokasi

Kegagalan Amerika Serikat untuk berperan sebagai mediator menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Akibatnya, provokasi dan konfrontasi menjadi semakin meningkat yang juga ditujukan kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 3 Mei 1964, dihadapan 2,1 juta sukarelawan, Presiden Sukarno mengucapkan pidato Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Dwikora ini berisi seruan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan revolusi Indonesia, serta membantu kaum revolusioner di Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah untuk mengatasi negara boneka Malaysia.<sup>60</sup> Setelah diumumkanannya Dwikora, tekanan militer semakin dipertinggi dan kekuatan gerilya diperbesar sampai ke Jazirah Malaya.

Pidato hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964 juga dijadikan arena provokasi untuk menentang Federasi Malaysia. Duta besar

---

<sup>59</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 155

<sup>60</sup> Frans S Fernandes. 1988. Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia, Suatu Pendekatan Sejarah. Jakarta : Dekdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Penelitian Tenaga Kependidikan, hlm 162.

Amerika Serikat yang masih bertahan di Indonesia mengomentari pidato yang berjudul "Tahun Vivere Perikoloso" (campuran bahasa Italia dengan bahasa Indonesia) atau "Tahun yang Penuh Bahaya" sebagai pidato yang paling tajam dan menggegerkan.<sup>61</sup> Dikatakan demikian, karena Presiden Sukarno dengan terbuka menyatakan pemerintahannya yang anti-Amerika Serikat dan lebih berpihak kepada RRC daripada berpihak ke Uni Soviet. Sedangkan Federasi Malaysia digambarkan sebagai suatu bentuk negara kolonialis yang tidak manusiawi.<sup>62</sup> Dari pernyataan ini berarti politik luar negeri bebas aktif sudah keluar dari relnya dan bergeser ke kiri. Prinsip "bebas" untuk tidak memihak salah satu blok bipolarisasi dunia telah dilanggar.

Bersamaan dengan provokasi melalui pidato yang berjudul "Tahun Vivere Perikoloso", dikirimkan satu rombongan sukarelawan yang terdiri dari 40 orang untuk didaratkan di Johor. Pendaratan itu juga diikuti" dengan pendropingan melalui Pesawat Hercules untuk membentuk basis gerilya. Sebuah pasukan pengacau dikirimkan kemudian melalui laut dan pantai Barat Semenanjung Malaysia. Pendaratan yang lain dilakukan pula di Pontian dan Labis yang menyebabkan pertempuran terbuka dengan pasukan Malaysia. Bahkan suatu langkah yang dramatis diambil pada awal bulan September 1963 ketika pesawat dari Indonesia menerjunkan pasukan yang cukup besar ke pusat daerah Johor pada saat yang sama dengan terjadinya kekerasan komunal di Singapura. Selain itu beberapa satuan gerilyawan sebelumnya sudah dikirimkan ke beberapa daerah, seperti di daerah Long Yawi yang berhasil menangkap 12 orang lawan. Kemudian

---

<sup>61</sup> Michael Leifer. *op .cit*, hlm 143.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 144.

di daerah Kalakan Tawao yang menyebabkan tewasnya 8 orang lawan dan melukai 19 orang lainnya. Selanjutnya di daerah Kapuas yang berhasil menawan 34 pasukan lawan. Lain daripada itu, beberapa Pesawat Helikopter dari Indonesia maupun Malaysia juga telah jatuh akibat peperangan tersebut. Di lain pihak, korban dari Indonesia-pun cukup banyak. Pada akhir tahun 1964, kegiatan penyusupan para sukarelawan semakin diintensifkan. Pertempuran antara lain terjadi di daerah Jombu, Biawak dan Bakelalan.<sup>63</sup>

Ketika serangan militer Indonesia ke wilayah Federasi Malaysia diajukan ke depan Sidang Dewan Keamanan PBB, wakil Indonesia di PBB, Dr. Sudjarwo Tjondronegoro mengakui secara terus terang sebagai berikut:

"Saya tak akan membantah, bahwa sukarelawan kami, gerilya kami dengan pemuda militan Serawak dan Sabah, beberapa diantara mereka telah dilatih di wilayah kami, telah memasuki apa yang dinamakan wilayah "Malaysia" di Serawak dan Sabah. Mereka telah berjuang di sana untuk beberapa waktu lamanya. Hal ini bukanlah rahasia....Dan sekarang pertempuran telah meluas ke daerah lain di "Malaysia", seperti Malaka".<sup>64</sup>

Pengakuan yang dikemukakan pada tahun 1964 ini menunjukkan, bahwa pihak Indonesia telah melakukan tindakan agresi terhadap wilayah kekuasaan Federasi Malaysia. Terlepas dari usaha-usaha pelanggaran yang dilakukan oleh lawan terhadap wilayah Indonesia serta subversi Inggris dan Malaya di Sumatera (antara lain dalam peristiwa pemberontakan PRRI), tindakan pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip non intervensi dalam politik luar negeri bebas aktif. Wilayah Indonesia sendiri hanya meliputi bekas jajahan Belanda.<sup>65</sup>

Sedangkan daerah Kalimantan Utara bekas jajahan Inggris yang meliputi Sabah

---

<sup>63</sup> A.H. Nasution, 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas "6", Masa Kebangkitan ORBA*. Jakarta : CV Haji Mas Agung, hlm65-73.

<sup>64</sup> Michael Leifer. *op. cit*, hlm 146.

<sup>65</sup> Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta : LP3ES, hlm 194..

dan Serawak bukan wilayahnya. Satu prinsip lagi yang menyatakan, bahwa setiap perselisihan internasional harus diselesaikan secara damai melalui musyawarah juga diabaikan. Tindakan konfrontasi fisik yang melampaui batas inilah yang menyebabkan Philipina yang sejak semula sejalan dalam menentang Federasi Malaysia, kemudian menyatakan tidak sependapat lagi dengan Indonesia.

Sementara itu, Uni Soviet yang pada mulanya bersifat pasif terhadap politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif, akhirnya berubah haluan. Pada tahun 1964 negeri ini kemudian memutuskan untuk mengirimkan utusannya yang bernama Mikoyan ke Indonesia. Kedatangan Mikoyan bertujuan untuk menjelaskan sikap negaranya dan menawarkan bantuan senjata dan pesawat pengempur kepada Indonesia. Mengetahui perubahan sikap Uni Soviet terhadap Indonesia, Amerika Serikat mulai mengubah sikap netralnya untuk berpihak kepada Federasi Malaysia. Ini terbukti ketika Tengku Abdul Rahman mengunjungi Amerika Serikat, kedua negara telah menandatangani pernyataan bersama yang berisi pernyataan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer, kredit uang dan pelatihan personil Malaysia.<sup>66</sup> Begitu pula setelah penandatanganan persetujuan, patroli armada VII Amerika Serikat di Lautan Hindia semakin gencar dan bantuan militer Australia bertambah banyak.

Antara tahun 1964 sampai pertengahan tahun 1965, slogan-slogan anti-Federasi Malaysia maupun anti-Barat meningkat. Gelombang demonstrasi juga mulai menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena ketika masalah Indonesia-Malaysia di bicarakan di PBB, Amerika Serikat lebih mendukung

---

<sup>66</sup> Frans S Fernandes. *op. cit.*, hlm 163.

Federasi Malaysia.<sup>67</sup> Buku-buku yang ditulis para pengarang Barat dibakar. Buruh kereta api dan para pegawai pos dan telekomunikasi mogok dalam melayani keperluan orang-orang Amerika Serikat. Distribusi perfilman Amerika Serikat dianggap sebagai imperialisme kebudayaan, karena itu William Palmer yang menangani bagian perfilman diusir dari Indonesia. Karyawan pabrik minyak mengambil alih harta milik perusahaan Shell, Stanvac dan Caltex, sehingga pemerintah turun tangan dan memutuskan bahwa manajemen perusahaan tetap pada pemilikinya, namun di bawah pengawasan menteri pertambangan. Perkebunan milik perusahaan Inggris dan Amerika Serikat juga telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan-perkembangan ini membuat pers asing mempertanyakan kelanjutan bantuan ekonomi Amerika Serikat maupun hubungan kedua negara. Sebagai jawabannya, sekali lagi muncul seruan "*go to hell with your aid*" untuk Amerika Serikat. Ketika masa jabatan duta besar Amerika Serikat yang lama, P. Jones, berakhir dan digantikan oleh Marshall Green, pada bulan Mei 1965, duta besar yang baru ini disambut dengan demonstrasi dan teriakan "*Marshall Green, go home !*".<sup>68</sup>

#### **D. Konfrontasi Indonesia Malaysia : Bukti Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.**

Pelaksanaan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni prinsip hidup bertetangga yang baik atau *good neighbour policy* dan prinsip non agresi. Selain

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 171

<sup>68</sup> Yahya Muhaimin. *op .cit*, hlm 155

itu, politik konfrontasi secara perlahan-lahan juga membawa Indonesia masuk ke dalam blok komunis RRC. Ini berarti juga telah melanggar prinsip yang paling dasar, yaitu prinsip "bebas" untuk tidak masuk dalam salah satu blok dunia. Pada bab ini akan diuraikan bukti pelanggaran prinsip "bebas" dengan adanya aliansi Indonesia RRC dan kemudian terbentuknya poros kesetiakawanan Jakarta-Peking-Pyong Yang. Selanjutnya akan diuraikan pula mengenai posisi Indonesia yang menjadi relatif terisolir karena tindakan politik konfrontatif tersebut.

### 1. Terbentuknya Aliansi Indonesia RRC

Situasi revolusioner dengan adanya politik konfrontasi terhadap Malaysia dimanfaatkan PKI untuk menyelaraskan dirinya dengan alur pikiran Presiden Sukarno yang bersifat revolusioner dan bercita-cita memimpin front internasional anti imperialis. Di sini, faktor *idiosynoratic* menjadi terbukti, bahwa watak kepemimpinan seorang tokoh sangat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Demikian pula di Indonesia, sifat Presiden Sukarno yang menyukai segala sesuatu yang bersifat revolusioner sangat mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dari suasana konfrontasi ini pula PKI mencari kesempatan untuk menimbulkan perasaan anti Barat. Di lain pihak, PKI juga berusaha membawa Indonesia masuk ke blok komunis RRC.

RRC sangat mendukung politik konfrontasi terhadap Malaysia, karena secara tidak langsung negeri komunis ini akan mendapat keuntungan, yakni berkurangnya pengaruh Barat. Meningkatnya pengaruh Amerika Serikat di Vietnam Selatan pada waktu itu membuat RRC khawatir tentang kemungkinan adanya satu negara lagi yang pro Barat di sebelah Selatannya setelah Muangthai,

Vietnam Selatan, Philipina dan Taiwan.<sup>69</sup> Oleh karena itu RRC dengan PKI mengharapkan suatu politik anti-Malaysia yang radikal untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Dengan bersembunyi di balik propaganda anti-imperialis, PKI berusaha mengarahkan politik luar negeri Indonesia agar sejalan dengan tujuan politik RRC.

Pada kenyataannya, politik konfrontasi yang pada awalnya ditujukan untuk menyerang pembentukan Federasi Malaysia, kemudian berkembang menjadi konfrontasi terhadap blok Barat pada umumnya. Lebih jauh lagi, politik konfrontasi dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh Barat yang dianggap sebagai kelompok negara-negara imperialis. Bermula dari politik konfrontasi terhadap Malaysia itulah, maka hubungan antara Indonesia dengan RRC menjadi sangat erat. Hubungan yang erat ini menyebabkan kedua negara dalam berbagai forum resmi terlihat seia-sekata. Misalnya dalam forum Konferensi Wartawan Asia-Afrika di Jakarta, kedua negara sepakat untuk menolak delegasi dari Vietnam Selatan yang merupakan anggota negara blok Barat. Pada tahun 1963 Presiden RRC, Liu Shao Chi, berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan kesamaan tujuan politik luar negeri kedua negara. Dalam balasannya, Presiden Sukarno menjelaskan, bahwa kedua negara berada dalam posisi yang sama sebagai komponen dari kelompok negara-negara baru atau *New Emerging Forces* (Nefos) yang sedang berjuang gigih melawan kelompok negara-negara lama atau *Old Established Forces* (Oldefos) yang imperialis. Pada kesempatan kunjungannya tersebut, Liu Shao Chi, juga menegaskan kembali dukungannya yang penuh terhadap politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia.

---

<sup>69</sup> M.C Ricklefs. 1991. A History of Modern Indonesia. Terjemahan Dharmono Hardjowidjono. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 414.

Pada Konferensi Non Blok II di Kairo, Mesir, tahun 1964, pidato Presiden Sukarno yang berjudul "Era konfrontasi" berusaha meyakinkan kepada para delegasi yang hadir, bahwa imperialisme-kolonialisme belum berakhir. Dikatakan pula, bahwa imperialisme-kolonialisme bekerja dalam bentuk manipulasi, intervensi, subversif dan sebagainya yang harus dihadapi dengan politik konfrontatif.<sup>70</sup> Pidato ini mendapat dukungan dari RRC, tetapi sebaliknya tidak mendapat dukungan dari mayoritas delegasi yang hadir.

Kerjasama yang erat antara Indonesia dengan RRC terwujud pula dalam penyelenggaraan *Games of The New Emerging Forces* (Ganefo) pada bulan November 1963. Ganefo adalah suatu pesta olah raga yang dimaksudkan sebagai tandingan dari Olympiade yang juga dianggap sebagai alat imperialis-kolonialis. Ganefo terlaksana berkat bantuan dana dan material dari RRC. Pesta olah raga inipun ternyata juga bertendensi politik, karena pesertanya dibatasi hanya negara-negara yang tergolong dalam kelompok Nefo. Selain itu, semboyannya yang berbunyi: "*Ever Onward Never Retreat*" (maju terus pantang mundur) ikut memperkuat adanya tendensi politik tersebut.<sup>71</sup>

Meskipun hubungan yang erat antara Indonesia dengan RRC telah dijalin sejak tahun 1963, tetapi sebenarnya, kesepakatan secara resmi kedua negara untuk saling mempererat hubungan baru terjadi pada akhir tahun 1964. Kesepakatan ini terjadi setelah adanya pertemuan singkat antara Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri RRC, Chou En Lai di Shanghai, RRC. Kerjasama yang disetujui dalam pertemuan itu menyangkut dua hal pokok. Pertama, mengenai masalah ekonomi

---

<sup>70</sup> Frans S Fernandes. *op. cit*, hlm 168.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 174.

secara keseluruhan. Kedua, adalah kerjasama di bidang pertahanan dan militer. Dalam bidang yang terakhir ini, Chou En Lai menjanjikan bantuan dan sekaligus kerjasama dalam teknologi nuklir dalam rangka untuk kepentingan konfrontasi dengan Federasi Malaysia. Pertemuan tersebut kemudian diperkuat dengan penandatanganan perjanjian mengenai prinsip-prinsip kerjasama kedua negara, yang berisi:

- a. Tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rangka menentang imperialisme dan neokolonialisme.
- b. Mendiskusikan bersama masalah dunia yang sedang atau yang akan datang untuk membangkitkan semangat juang.
- c. Kedua pihak sepakat, bahwa perjuangan melawan Nekolim merupakan suatu perjuangan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. RRC akan meyakinkan seluruh penduduknya untuk membantu Indonesia menghadapi Malaysia, karena Malaysia merupakan ancaman bagi negara-negara di Asia Tenggara.
- e. RRC akan memberikan bantuan sebesar 50 juta dollar.<sup>72</sup>

Isi perjanjian di atas menunjukkan hubungan Indonesia-RRC yang semakin erat. Khusus untuk menghadapi Malaysia, Chou En Lai menganjurkan agar dibentuk angkatan ke-5 yang terdiri dari kaum buruh dan tani.<sup>73</sup> Desakan untuk membentuk angkatan ke-5 sebelumnya dikeluarkan oleh PKI, tetapi setelah

---

<sup>72</sup> Frans S Fernandes. *loc. cit.*

<sup>73</sup> Yang dimaksud dengan angkatan 5 adalah masyarakat sipil. Di Indonesia memiliki 4 angkatan yaitu ( angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi) maksud dibentuknya angkatan 5 adalah untuk memperkuat basis PKI yang pendukung utamanya adalah masyarakat sipil yang terdiri dari kaum buruh dan petani.

ditelusuri ternyata idenya berasal dari RRC Chou En Lai bahkan menyatakan kesediaannya untuk memasok persenjataan bagi angkatan ke-5.

Kunjungan Presiden Sukarno pada akhir tahun 1964 ke RRC, kemudian diteruskan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri. Wakil Perdana Menteri Subandrio dengan suatu delegasi yang besar pada awal tahun 1965. Dari kunjungan tersebut, Subandrio berhasil memperoleh dukungan politik dari pemerintah RRC. Surat kabar PKI, Harian Rakjat, menyebut misi ini sebagai "sebuah karya yang brilian", karena telah sukses mencapai tujuannya, yakni mempererat hubungan kerjasama dengan RRC. Dalam kunjungannya itu, Subandrio mengatakan, walaupun Uni Soviet telah memberikan bantuan kepada Indonesia, tetapi negara tersebut tidak akan menjadi "payung" atau pelindung Indonesia. Menanggapi hal ini, Chou En Lai, menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak usah mengharapkan bantuan dari Uni Soviet. RRC-lah yang akan membantu sepenuhnya perjuangan Indonesia. Selanjutnya ketika Subandrio menanyakan kemungkinan besar Inggris menyerang Indonesia, Chou En Lai menjawab, bahwa:

"Menurut laporan intelijen RRC, Inggris belum mau menjerang Indonesia. Tetapi kalau mereka kalap, kita harus siap-siap. Mungkin akan ada demonstrasi militer bersama oleh Nekolim (yang dimaksud kiranya manuver atau latihan bersama oleh armada Inggris dan sekutunja). Kalau ini terjadi adakan mobilisasi umum menentang demonstrasi itu, pertinggi kewaspadaan, persendjatai rakjat patriotik. RRC berpengalaman di daerah pesisir dalam perang melawan Chiang Kai Shek. RRC akan membantu 100.000 pucuk sendjata dengan tjuma-tjuma guna melawan Malaysia".<sup>74</sup>

Dalam pertemuan itu Subandrio juga menegaskan kepada Chou En Lai tentang kecondongan Indonesia untuk berpihak kepada RRC sehubungan dengan

---

<sup>74</sup> Hidayat Mukmin. *op. cit*, hlm 101.

adanya pertikaian antara komunis RRC dengan Uni Soviet. Kemudian diingatkan pula, bahwa kedua negara harus waspada terhadap negara-negara Non Blok dan blok *peaceful coexistence*.<sup>75</sup>

Dalam pada itu, di tengah-tengah memuncaknya konfrontasi terhadap Malaysia dan semakin akrabnya Indonesia dengan RRC, secara tidak terduga Malaysia diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia mengajukan protes, tetapi tidak mendapat simpati dari dunia internasional. Berhubung tidak mendapat tanggapan, maka sehari setelah pengesahan resmi Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman akan keluar dari keanggotaannya di PBB. Keputusan ini dianggap terlalu berani oleh negara-negara lain. Hanya RRC yang menyatakan dukungannya atas keputusan Indonesia untuk meninggalkan PBB.

Kekecewaan terhadap PBB menimbulkan suatu anggapan, bahwa PBB juga telah dimanipulasi Amerika Serikat.<sup>76</sup> Sebagai penggantinya, dengan dukungan RRC, pemerintah Indonesia akan membentuk *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo) yang khusus beranggotakan negara-negara kelompok Nefos sebagai tandingan PBB. Penarikan diri Indonesia dari PBB ini semakin menandai masuknya Indonesia ke blok komunis RRC. Pada tanggal 28 Januari 1965 kedua negara bersepakat untuk menandatangani perjanjian bersama yang berisi:

- a. Kedua negara mengutuk Amerika Serikat sebagai pemirnpin imperialisme, kolonialisme dan yang melaksanakan intervensi, subversi, intimidasi dan agresi di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

---

<sup>75</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 165.

<sup>76</sup> Frans S Fernandes. *op. cit*, hlm 163-164.

- b. Kedua negara mengutuk kejahatan imperialis Amerika Serikat dan Inggris dan menyatakan untuk mendukung rakyat Kamboja, Vietnam dan Laos.
- c. Kedua negara akan sepakat untuk membentuk gerakan anti imperialisme secara kesatuan dan menyeluruh.
- d. Indonesia mempertegas perjuangan terhadap Malaysia, dan RRC tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat atau Inggris memerangi Indonesia.
- e. Kedua pihak memutuskan untuk menegaskan kerjasama teknik, perluasan perdagangan dan peningkatan transportasi laut.<sup>77</sup>

Dari isi perjanjian ini berarti Indonesia telah beraliansi dengan blok komunis RRC, karena kerjasama tersebut disertai dengan cara dan rasa permusuhan terhadap blok Barat. Suatu hal yang perlu dicatat untuk pertama kalinya terjadi, bahwa Indonesia mengikatkan diri dengan negara lain dalam bidang kemiliteran. Ini jelas sangat bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, kenyataan ini juga membuktikan betapa jauh hubungan antara kedua negara. Dari pernyataan yang dibuat bersama ditandaskan, bahwa "*no peaceful co-existence is possible between the emerging forces and the old established forces*".<sup>78</sup> Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Brackman, bahwa pernyataan tersebut mengandung arti kedua negara akan meninggalkan koeksistensi damai dengan blok Barat.<sup>79</sup>

Sebagai puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1965 dibentuklah poros kesetiakawanan Jakarta-Hanoi-Pnom Penh-Peking-Pyong Yang, atau sering disebut dengan Jakarta-Peking-Pyong Yang. Tujuannya adalah untuk melawan imperialisme-kolonialisme dan menghancurkan pengaruh blok Barat di Asia.

<sup>77</sup> Frans S Fernandes. *op. cit*, hlm 175.

<sup>78</sup> Anak Agung Gde Agung. *op. cit*, hlm 440." Tidak ada keberadaan bersama yang damai diantara pasukan dua kekuatan baru."

<sup>79</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 165.

## 2. Posisi yang terisolasi

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif juga menyebabkan terisolirnya Indonesia dari pergaulan dunia internasional. Padahal prinsip politik luar negeri bebas aktif menekankan adanya persahabatan dan kerjasama dengan berbagai bangsa atas dasar saling menghormati kedaulatan masing-masing. Khususnya negara-negara Non Blok maupun kelompok Asia Afrika, semakin menjauhkan diri karena tidak setuju dengan politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif. Selain itu, negara-negara ini juga merasa curiga terhadap hubungan Indonesia-RRC yang sangat erat.

Hubungan Indonesia dengan India yang semula sangat baik, menjadi retak karena perbedaan persepsi politik. Perpecahan "*dua sahabat akrab*" ini dimulai pada Konferensi Non Blok I di Beograd, Yugoslavia, tahun 1961. India berada dalam kelompok perjuangan Non Blok yang moderat, sedangkan Indonesia tergolong kelompok yang militan. Demikian pula India tidak setuju dengan politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif menyerang Malaysia. Hubungan kedua negara ini menjadi bertambah buruk, karena semakin erat dan sinkronnya politik luar negeri Indonesia dengan RRC. Memang merupakan suatu ironi sejarah, bahwa sekitar dua puluh tahun setelah kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap India. Padahal ketika bangsa Indonesia sedang berjuang mencapai kemerdekaannya, India telah memberikan bantuannya tanpa pamrih, terutama di bidang diplomasi internasional.

Pada bulan Oktober 1964 dilangsungkan Konferensi Non Blok II di Kairo, Mesir. Dalam forum ini, delegasi Indonesia harus menelan kekecewaan, karena usul-usulnya kurang mendapat sambutan. Pidato Presiden Sukarno yang berjudul "Era Konfrontasi" atau "*The Era of Confrontation*", menurut laporan dan ulasan dari berbagai radio luar negeri tidak mendapat tanggapan dalam sidang umum konferensi. Pidato tersebut bahkan dinilai kontroversial, hingga menimbulkan reaksi tajam dari delegasi India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shastri dan delegasi Yugoslavia di bawah pimpinan Presiden Tito. Dalam pidato balasannya, Perdana Menteri Shastri mengatakan, bahwa masalah-masalah dunia tidak dapat dipecahkan dengan cara konfrontasi. Tokoh dari India ini juga menuduh, bahwa Presiden Sukarno belum dapat memahami arti kata *peaceful co-existence* secara mendalam. Sikap Perdana Menteri Shastri rupanya masih konsisten dengan sikap pendahulunya, yaitu Nehru, yang menekankan upaya perdamaian dan hubungan baik antar bangsa.

Sebagai hasil dari Konferensi ini dinyatakan bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Dijelaskan pula pengertian *peaceful co-existence* yang berarti kewajiban bagi setiap negara untuk saling menghormati setiap tata cara hidup dan sistem pemerintahan negara lain. Kecuali itu, dalam resolusinya disebutkan mengenai dukungan dan bantuan militer bagi gerakan kemerdekaan di Angola dan Mozambique, dan bukan gerakan kemerdekaan di Kalimantan Utara pimpinan Azahari.<sup>80</sup>

Ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan politik luar negeri konfrontatif juga dikemukakan oleh pihak Yugoslavia. Sebelumnya, seperti halnya India, negeri ini

---

<sup>80</sup> Hatta dan Anak agung Gde Agung. *op. cit*, hlm 121.

merupakan teman seperjuangan Indonesia dalam memelopori gerakan Non Blok. Beberapa karangan yang telah dimuat dalam beberapa surat kabar Yugoslavia, seperti *Borba* dan *Politika* menyerang dengan tajam Pidato Presiden Sukarno di Kairo. Surat kabar itu secara terus terang menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah menjadi juru bicara pemerintah Peking.<sup>81</sup>

Pelaksanaan politik luar negeri yang konfrontatif, menjadi penyebab pula dalam keretakan hubungan dengan Philipina. Philipina yang semula mendukung politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, dengan alasan, bahwa wilayah Sabah adalah miliknya, pada akhirnya menghentikan dukungannya kepada Indonesia. Philipina tidak setuju dengan tindakan pemerintah Indonesia yang semakin meningkatkan konfrontasi militernya, sehingga banyak menimbulkan korban.

Kemudian Australia, sebuah negara di kawasan Asia Pasifik, yang pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak memberikan andilnya, maka pada masa terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia negeri ini justru bersikap sebaliknya. Politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif dianggap sangat raembahayakan dan "tidak ramah". Sebenarnya, perpecahan kedua negara ini sudah nampak sejak Indonesia melakukan politik konfrontatif untuk merebut kembali Irian Barat. Tetapi, ketidakharmonisan itu dapat diperbaiki dengan suatu persetujuan bersama yang menyatakan, bahwa Australia tidak akan menentang bila terjadi penyelesaian damai antara Indonesia Belanda. Perdana Menteri Australia, Menzies, kemudian datang ke Indonesia untuk membujuk agar masalah

---

<sup>81</sup> *Idem.*

Irian Barat dapat diselesaikan secepatnya secara damai. Akan tetapi, setelah masalah Irian Barat dapat diselesaikan secara damai, ternyata politik konfrontatif diteruskan kembali untuk menyerang pembentukan Federasi Malaysia. Akibatnya, hubungan kedua negara memburuk kembali. Lepas dari kedudukan Australia yang merupakan sekutu Inggris atau blok Barat pada umumnya, sikap pemerintah negeri ini terhadap Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor penting. Pertama, perbedaan dalam pandangan dasar mengenai bahaya komunis. Kedua, menyangkut pandangan tradisional di Australia yang mengacu pada konsep *defence in depth*, yang menentang dikuasainya wilayah yang berbatasan dengan Australia oleh negara yang tidak bersahabat. Selain itu, yang juga menentukan pola hubungan buruk ini adalah model pemerintahan Presiden Sukarno yang dianggap sebagai eksponen politik ekspansionis.<sup>82</sup>

Demikian pula keputusan pemerintah Indonesia untuk keluar dari PBB, semakin menempatkan posisi Indonesia dalam keadaan yang sulit. Hanya beberapa negara blok komunis yang belum menjadi anggota PBB, seperti Vietnam Utara dan RRC yang mendukung tindakan Indonesia. Di lain pihak hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Barat semakin memburuk penuh permusuhan. Keadaan yang demikian sangat mematangkan Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dalam pergaulan internasional untuk menjadi suatu negara komunis.<sup>83</sup>

Anak Agung dalam salah satu suratnya kepada Hatta memberikan komentar mengenai keluarnya Indonesia dari PBB beserta akibatnya sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Hilman Adil. 1977. *Beberapa Segi Politik Bertetangga Baik antara Indonesia dengan Australia*. Dalam PRISMA no.9 tahun VI.

<sup>83</sup> H.M Sabir. *op. cit.* hlm 195.

"Memang Presiden Sukarno boleh berkata, bahwa keputusannya tersebut menggegerkan seluruh dunia, akan tetapi, sepanjang pendengaran saya di dalam hampir semua siaran radio luar negeri, tindakan tersebut tidaklah mendapat simpati dan penghargaan, kecuali dari RRC, Korea Utara dan Vietnam Utara, ketiga negara mana tidak menjadi anggota PBB. Bukan saja negara Nekolim yang mencela tindakan Presiden Sukarno itu, akan tetapi hampir semua negara-negara Asia-Afrika seperti Mesir, India dan lain-lain negara dari kelompok tersebut bukan saja menyesalkan tindakan itu, bahkan mencelanya dan menganggap politik berjibaku ini di dalam bidang internasional suatu pertanda bahwa Indonesia sudah merupakan satelit dari Peking. Tidaklah pernah Indonesia pada dewasa ini demikian terpercil kedudukannya dan kehilangan kawan-kawan yang setia di dalam pergaulan antar bangsa".<sup>84</sup>

Dengan demikian keputusan untuk keluar dari PBB ini tidak mendapat dukungan dari kelompok yang diistilahkan sebagai "negara baru" atau Nefos sekalipun. Pada abad ke-20 setelah Perang Dunia II berakhir, opini negara-negara di dunia lebih tertarik untuk menjalin kerjasama antar negara di berbagai bidang demi kesejahteraan manusia. Pandangan dunia juga bertekad untuk menghapus kenangan buruk Perang Dunia II yang telah banyak menimbulkan korban sehingga nasionalisme sempit dan militan yang banyak menimbulkan malapetaka dan peperangan sudah mulai ingin ditinggalkan. Posisi Indonesia yang terisolir terlihat pula dalam forum-forum internasional lainnya yang berlangsung pada tahun 1965. Dalam beberapa forum yang berlangsung, negara-negara lain enggan untuk bekerjasama dengan Indonesia. Misalnya dalam forum Konferensi Islam Asia-Afrika pada bulan Maret 1965 di Bandung, suatu rancangan resolusi yang disponsori Indonesia dengan RRC untuk menolak keberadaan Malaysia tidak mendapat dukungan. Walaupun dalam ajakan itu Presiden Sukarno mengatakan, bahwa "kita sekarang sedang menyerang kubu terakhir

---

<sup>84</sup> Anak Agung Gde Agung. *op. cit.*, hlm174.

imperialisme.”<sup>85</sup> Pada akhirnya salah satu dari hasil konferensi justru berisi mengenai penentangan terhadap usaha-usaha pembuatan senjata nuklir. Keputusan ini jelas berlawanan dengan kepentingan Indonesia yang telah memberikan keterangan kepada masyarakat luas mengenai pembuatan bom nuklir yang akan terwujud pada tahun 1965.

Kemudian pada peristiwa peringatan Satu Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan pada bulan April 1965 di Jakarta terlihat pula ketidaksediaan negara-negara lain untuk berhubungan dan bekerjasama dengan Indonesia. Dari 60 negara yang diundang, hanya 36 negara yang bersedia hadir. Dari jumlah itupun, mayoritas yang hadir hanya para duta besar yang berdinasi di Indonesia dan bukan kepala negara. Utusan dari Philipina juga tidak hadir, yang tentunya memberi kesan hubungan kedua negara yang semula dekat, terutama dalam menghadapi Malaysia telah berakhir. Menurut Leifer, para delegasi yang hadir dalam peringatan Satu Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika tersebut telah menolak anggapan bahwa Malaysia merupakan manifestasi dari neokolonialisme. Indonesia yang mampu mengisolasi Malaysia secara internal, tetapi justru Indonesia sendirilah yang berada dalam posisi terisolasi internasional.<sup>86</sup>

Untuk yang terakhir strategi diplomatik untuk melawan Malaysia gagal lagi dalam Konferensi Asia-Afrika II yang rencananya akan diadakan di Aljazair pada bulan Juni tahun 1965. Kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Houari Boumedienne menggeser Presiden Aljazair, Ben Bella, dari jabatannya ketika Presiden Sukarno sedang dalam perjalanan menuju ibukota Aljazair. Karena kontroversi yang

---

<sup>85</sup> Michael Leifer. *op. cit.*, hlm 150.

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm 151.

diduga akan terjadi terhadap keikutsertaan Uni Soviet dan kekhawatiran terhadap solidaritas Asia-Afrika yang akan terganggu dengan adanya konflik RRC-Uni Soviet, maka kudeta ini dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika II hingga bulan November 1965. Padahal di Indonesia pada bulan Oktober telah terjadi perubahan politik dalam negeri akibat adanya pemberontakan G.30 S/PKI.

Menurut analisis Hatta yang ditulis dalam suratnya untuk Anak Agung, seandainya Konferensi Asia-Afrika II dapat terlaksana pada bulan Juni 1965, posisi Indonesia akan tetap terisolir. Hal ini akan terjadi karena Malaysia telah mendapat backing dari negara-negara yang cukup banyak, sehingga keikutsertaannya dalam konferensi itu tidak dapat dicegah. Padahal Presiden Sukarno telah mengatakan, jika Malaysia diterima dalam konferensi itu, maka Indonesia akan "angkat kaki" seperti yang dilakukan terhadap PBB. Dengan demikian sudah tentu kedudukan Indonesia akan semakin terisolir, terutama dari negara-negara Asia-Afrika, atau sekurang-kurangnya telah memecah kelompok Asia-Afrika.<sup>87</sup>

Di sisi lain hubungannya yang memburuk dengan negara-negara blok Barat maupun PBB, mengakibatkan ditariknya bantuan kredit dari negara-negara blok Barat dan dari Bank Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* yang bernilai jutaan dollar. Sehingga kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak menentu. Dengan demikian, dengan pelaksanaan politik yang konfrontatif, maka politik luar negeri Indonesia tidak ditujukan untuk mencari "kawan"

---

<sup>87</sup> Hatta dan Anak Agung Gde Agung. *op. cit.*, hlm 272.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

76

sebanyak-banyaknya . Sebaliknya, semakin memperbanyak permusuhan atau minimal menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara lain dan mengisolasi diri dari dunia internasional, terutama terisolasi di bidang politik. Sampai akhirnya perubahan politik dalam negeri yang ditandai dengan adanya pemberontakan G. 30 S/PKI pada akhir bulan September 1965 mengubah kira-kira dalam waktu satu bulan, baik karakter sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, maupun peranan dominan Presiden Sukarno dalam membuat dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia.



## BAB IV

### AKHIR KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA

Di tengah-tengah kegagalan yang berulang-ulang untuk mencari dukungan internasional bagi pelaksanaan politik konfrontasi dan adanya kecondongan kuat bagi Indonesia untuk bekerjasama secara erat dengan RRC, membuat beberapa perwira senior militer mulai ragu akan manfaat politik konfrontasi terhadap Malaysia. Begitu pula keluarnya Indonesia dari PBB semakin memberikan kebebasan untuk meningkatkan pasukan yang dikerahkan ke perbatasan Malaysia. Akibatnya, kondisi ibukota Republik Indonesia mulai rawan. Setidak-tidaknya, kesempatan ini dapat dipergunakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah di Jakarta, karena pengamanan di kota tersebut berkurang dan perhatian seluruhnya sedang dicurahkan kepada pelaksanaan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Dalam situasi yang demikian, kemudian mulai dikembangkan gagasan rujuk dengan Malaysia oleh beberapa pimpinan ABRI, khususnya TNI AD karena tergugah oleh rasa wajib menyelamatkan bangsa dan negara. Para perwira senior ABRI ini sejak tahun 1964 ternyata telah mengadakan pembicaraan pendahuluan secara rahasia dengan wakil dari Malaysia di Bangkok dan Hongkong.<sup>88</sup>

Pembicaraan secara rahasia ini dimaksudkan sebagai upaya penjajagan bagi penyelesaian sengketa kedua negara. Hingga akhirnya, setelah melalui proses yang cukup menegangkan, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang berlangsung sekitar tiga tahun dapat dihentikan. Ada beberapa faktor pendukung

---

<sup>88</sup> Michael Leifer. *op. cit.*, hlm 150.

yang menyebabkan konfrontasi dapat diakhiri. Termasuk perubahan politik dalam negeri akibat gagalnya pemberontakan G. 30 S/PKI turut memberikan andil yang besar dalam usaha penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia.

### A. Normalisasi Hubungan

Usaha untuk merintis penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum terjadinya tragedi berdarah yang dilakukan oleh pemberontakan G. 30 S/PKI pada akhir bulan September 1965. Tetapi, karena usaha ini bersifat rahasia dan tidak diketahui secara resmi oleh Presiden Sukarno, maka masyarakat umum juga tidak mengetahuinya. Usaha penyelesaian konfrontasi ini baru diketahui secara luas setelah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tanggal 11 Maret 1966.

Adapun upaya penyelesaian itu sendiri tepatnya telah dimulai sejak bulan Januari 1964 setelah gagalnya pertemuan puncak antara Presiden Sukarno dengan Tengku Abdul Rahman di Tokyo. Pada awal tahun 1964 kedua tokoh ini memang telah bertemu di Tokyo atas prakarsa dari utusan Amerika Serikat, yakni Jaksa Agung Robert Kennedy. Pertemuan di Tokyo yang dimaksudkan untuk membicarakan masalah gencatan senjata ternyata menemui kegagalan, sebagai akibatnya konfrontasi pun terus berlanjut. Dari kegagalan ini yang didukung oleh berbagai pertimbangan lain, akhirnya memberikan motivasi kepada para *peace feelers* (para perintis damai) yang berasal dari kalangan militer untuk mengusahakan penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung sejak tahun 1963.

## 1. Faktor Pendukung Normalisasi

### a. Faktor Intern

1) Kesungguhan dari para perwira senior militer, khususnya dari TNI AD sebagai *peace feelers* untuk mengusahakan penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia tanpa melalui pihak ke-3- Hingga muncul suatu pertanyaan, mengapa yang berperan sebagai pelopor usaha damai justru TNI AD? Jawabannya bahwa hal ini masih berkaitan dengan posisi ABRI dalam percaturan politik nasional, maupun kewajibannya untuk menyelamatkan negara. Saat itu di Indonesia terdapat tiga kekuatan politik yang tangguh, yakni PKI, Presiden Sukarno dan ABRI. Telah diketahui, bahwa Presiden Sukarno sangat dekat dengan PKI, di lain pihak sikapnya terhadap ABRI terlihat ambivalen. TNI-AD yang merupakan unsur terkuat dari ABRI dengan tokoh-tokohnya yang anti-komunis merasa khawatir dengan perkembangan PKI yang pesat dan membahayakan keberadaan ABRI maupun keselamatan negara pada umumnya. Saling mencurigai terhadap kekuatan masing-masing bukan merupakan hal yang rahasia di antara ABRI dengan PKI pada waktu itu. Situasi ini kemudian dikaitkan dengan adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Suasana konfrontasi akan memberikan keuntungan yang besar bagi PKI untuk meningkatkan pengaruhnya, untuk beragitasi, atau bahkan untuk menusuk Republik Indonesia dari belakang. Sementara itu Presiden Sukarno dengan sikapnya yang sangat anti-kolonialis dan revolusioner tidak mungkin begitu saja bersedia menghentikan konfrontasi. Dalam keadaan seperti ini, TNI-AD khususnya menjadi kurang bergairah untuk mendukung politik konfrontasi dibandingkan dengan TNI-AL maupun TNI-AU. Alur pemikiran

strategik pimpinan ABRI menyatakan, bahwa apapun kebijaksanaan luar negeri yang telah ditetapkan pemerintah wajib dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, para perwira TNI-AD khususnya juga harus mempunyai konsep pemikiran cadangan dalam bentuk kebijaksanaan alternatif seandainya kebijaksanaan nasional yang telah digariskan menemui kegagalan. Selain itu oleh para pimpinan ABRI, kebijaksanaan pemerintah tetap harus dikaji, sejauh mana dampak atau besar-kecil resikonya terhadap keselamatan bangsa dan negara. Jika semakin besar resikonya, terutama resiko pecahnya perang dengan negara lain atau timbulnya pemberontakan di dalam negeri, maka harus semakin hati-hati dalam melaksanakan kebijaksanaan nasional.<sup>89</sup>

Dengan demikian, ada dua pertimbangan yang menyebabkan TNI-AD berperan sebagai *peace feelers* Pertama, pertimbangan strategik militer. Pertimbangan ini berpola, bahwa apabila konfrontasi dengan Malaysia diteruskan, pihak Indonesia tidak akan memperoleh keuntungan. Malaysia didukung oleh kekuatan besar dari Inggris, Australia, Selandia Baru, dan kemungkinan besar juga dari Amerika Serikat mengingat kecondongan Indonesia yang semakin erat dengan RRC. Sedangkan Indonesia hanya didukung oleh RRC, yang dampaknya justru akan semakin menarik Indonesia ke dalam orbit pengaruh RRC. Untuk mencari dukungan kekuatan dari negara-negara kelompok Asia-Afrika maupun Non Blok sangat sulit, karena negara-negara tersebut tidak tertarik dengan politik konfrontatif. Di sisi lain, untuk meminta bantuan kepada Uni Soviet seperti halnya dalam masalah Irian Barat kecil kemungkinannya akan berhasil, karena

---

<sup>89</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 143.

pemerintah Indonesia (yang sudah dipengaruhi PKI) lebih memihak RRC dalam perebutan hegemoni komunisme di dunia pada saat itu.<sup>90</sup> Bila perang terbuka pecah, perang ini pasti akan berlarut-larut hingga dapat menghabiskan seluruh potensi nasional yang ada. Kedua, karena pertimbangan politis. Pertimbangan ini berhubungan langsung dengan keamanan dan keselamatan negara, eksistensi ABRI dan dominasi PKI yang kian memuncak di tahun 1964. Jika konfrontasi dengan Malaysia terus berlarut-larut, PKI-lah yang banyak mengambil untung dari situasi tersebut. Pengiriman pasukan ke luar Jawa untuk kepentingan konfrontasi akan mengakibatkan kekosongan di Pulau Jawa, dan ini akan dipergunakan PKI untuk merebut pemerintahan. Hal senada juga pernah dikatakan oleh Hatta, bahwa di atas puing-puing kehancuran konfrontasi itulah cita-cita PKI untuk mendirikan rezim komunis diwujudkan.<sup>91</sup>

Kedua pertimbangan tersebut kemudian dirangkai dengan faktor ekonomi yang sifatnya hanya tersirat, karena belum pernah terungkapkan secara nyata.<sup>92</sup> Dilihat dari sudut pandang ekonomi, politik konfrontasi yang berlarut-larut akan menelan biaya besar. Pada hal kondisi perekonomian Indonesia sangat lemah hingga tidak mungkin dapat memenangkan konfrontasi, melainkan justru akan dapat menghancurkan Indonesia sendiri.

Dari beberapa pertimbangan itu, pihak TNI-AD khususnya kemudian berkeinginan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Maka beberapa personil digerakkan secara rahasia tanpa izin resmi dari Presiden Sukarno, tetapi dengan seizin penuh dari Mayor Jenderal Ahmad Yani. Beberapa tokoh TNI-AD

<sup>90</sup> Yahya Muhaimin. *op.cit*, hlm 112-113.

<sup>91</sup> Hatta dan anak Agung Gde Agung. *op.cit*, hlm 61.

<sup>92</sup> Yahya Muhaimin. *op.cit*, hlm 112-113.

yang berperan penting dalam hal ini selain Ahmad Yani adalah Suharto, Ali Murtopo, L.B.Murdani, Suparjo Rustam, Sugeng Jarot, A. Rachman Ramli dan Yoga Sugomo.<sup>93</sup>

2) Gagalnya pemberontakan G. 30 S/PKI. Dengan posisinya yang cukup kuat, PKI semakin berani mengambil langkah. Pada bulan Januari 1965 tuntutan mereka atas kaum buruh tani agar dipersenjatai lebih diperhebat. Kemudian pada bulan Mei tahun itu juga dilancarkan isu adanya Dewan Jenderal menurut yang mereka sebut dengan "Dokumen Gilchrist" yang menyatakan adanya suatu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Isu ini berkembang menjadi berita yang hangat dalam setiap pembicaraan.

Belum reda isu mengenai adanya Dewan Jenderal, muncul lagi suatu berita yang juga cukup meresahkan, yakni sakitnya Presiden Sukarno. Beberapa dokter yang sengaja didatangkan dari RRC untuk memeriksa, menyatakan bahwa Presiden Sukarno sakit parah dan akhir hidupnya tidak akan lama lagi. Donald Hindley, seorang pakar yang mendalami sejarah dan peranan ABRI berpendapat, bahwa sakitnya Presiden Sukarno menjadi pertimbangan serius oleh kekuatan di luar Presiden, yakni ABRI dengan TNI-AD khususnya dengan PKI untuk saling mencurigai.<sup>94</sup> Pendapat ini ada juga benarnya ketika ternyata PKI terlebih dahulu terdorong untuk melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang menyebabkan gugurnya beberapa putra terbaik dari TNI AD. Kudeta yang dilakukan PKI dengan G. 30 Snya ternyata menemui kegagalan, karena dapat

---

<sup>93</sup> Mukmin Hidayat. *op. cit*, hlm 55.

<sup>94</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 175.

ditumpas oleh ABRI. Menurut A.H. Nasution, seorang jenderal yang lolos dari pembunuhan PKI, bahwa poros peristiwa "1 Oktober 1965" atau tanggal 30 September ini hari adalah sama dengan poros peristiwa "Madiun 1948", yakni menguasai militer sebagai landasan untuk merebut kekuasaan politik.<sup>95</sup>

Walaupun begitu, gagalnya pemberontakan G. 30 S/PKI tidak langsung dapat memperlancar usaha penyelesaian konfrontasi. Setelah adanya peristiwa tersebut posisi Presiden Sukarno memang melemah dalam arti wibawanya menurun, karena ia tidak bersedia membubarkan PKI. Namun, di lain pihak secara formal ia masih dalam posisi yang kuat. Ia juga masih bersikeras untuk meneruskan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Sikapnya yang tidak bersedia membubarkan PKI bukan karena ia ragu-ragu, melainkan karena ia masih konsisten dengan cita-citanya sejak tahun 1926 untuk membentuk Nasakom. Ia khawatir dengan membubarkan PKI akan timbul perang saudara antara golongan yang pro dan kontra PKI, yang akhirnya akan mengakibatkan pertumpahan darah baru. Selain itu membubarkan PKI akan menjatuhkan martabatnya di dunia internasional.

Hingga kemudian keluar Surat Perintah 11 Maret 1966 dengan Letjen. Suharto sebagai pengembannya. Dengan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar ini pula Letjen. Suharto mempunyai wewenang untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi memelihara keamanan, ketenangan dan stabilitas negara. Selain itu Supersemar ini juga dipergunakan untuk membubarkan PKI sekaligus landasan untuk mengatur kembali hubungan luar negeri Indonesia dengan upaya normalisasi dengan Malaysia sebagai prioritas yang utama.

---

<sup>95</sup> A.H Nasution. *op. cit*, hlm7.

Pihak Malaysia juga sangat gembira, bahwa pemberontakan komunis di Indonesia dapat ditumpas, yang berarti ini semakin melicinkan jalan ke arah normalisasi hubungan kedua negara. Pemerintah Indonesia, juga menerima niat baik pihak Malaysia yang ingin memberikan bantuan obat-obatan dan tawaran untuk mencairkan kembali uang pemerintah Indonesia yang didepositokan di Kualalumpur yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah Malaysia, karena adanya politik konfrontatif.

### b. Faktor Ekstern

1) Kesungguhan dari para *peace feelers* pihak Malaysia. Jika para *peace feelers* dari Indonesia berasal dari kalangan militer, maka para *peace feelers* Malaysia berasal dari kalangan sipil. Para tokoh dari Malaysia itu adalah Tan Sri Muhammad Ghazali bin Shafie, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (1969/1970), Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak dan seorang staf Kementerian Luar Negeri, Muhammad Sulong. Mereka adalah para pemimpin dari generasi yang lebih muda yang walaupun berpendidikan Inggris, tetapi berpikiran moderat dan mempunyai jangkauan pikiran yang jauh berbeda dengan Tengku Abdul Rahman. Bagi mereka, konfrontasi yang berlarut-larut tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan karenanya harus dihentikan.

Yang menarik, bahwa usaha damai dari pihak Malaysia ini juga dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tengku Abdul Rahman maupun pemerintah Inggris. Tan Sri Muhammad Ghazali tidak bertindak selaku sekretaris jenderal kementerian luar negeri, tetapi sebagai kepala intelijen keamanan

nasional Malaysia. Maksudnya agar usaha damai dengan Indonesia tidak diketahui oleh kabinet, parlemen atau lembaga-lembaga kenegaraan yang lain, serta tidak diketahui pihak Inggris. Kebetulan pengalaman Tan Sri Muhammad Ghazali sebagai seorang intelijen cukup bisa diandalkan, karena ia pernah menjadi perwira intelijen Sekutu dalam Perang Pasifik, pernah pula menjadi anggota Gerakan Bawah Tanah Malaya serta menjadi perwira muda pasukan Malaya-Inggris. Adapun alasan para *peace feelers* dari Malaysia untuk kontak dengan TNI-AD didasarkan pada analisis intelijennya yang menyimpulkan, bahwa banyak tokoh TNI-AD yang anti komunis. Selain itu, TNI-AD sebagai unsur terkuat dari ABRI terlihat kurang tertarik dengan politik konfrontasi dibandingkan dengan TNI-AU mau-pun TNI-AL.<sup>96</sup>

2) Kelemahan struktural Pemerintahan Federasi Malaysia. Usaha untuk menyelesaikan sengketa kedua negara dilihat dari faktor ekstern juga didorong oleh kenyataan lemahnya struktur pemerintahan Federasi Malaysia yang akhirnya dapat menyebabkan desintegrasi. Sejak awal, pembentukan Federasi Malaysia bukan tanpa tantangan. Ketika diadakan penyelidikan yang dipimpin oleh Cobbold terdapat suara pemilih yang ingin tetap berada di bawah pemerintah Inggris. Di wilayah Brunai dan Sabah juga ada penentangan. Kemudian dari luar Federasi Malaysia tercatat adanya penentangan dari Indonesia dan Philipina walaupun dengan alasan yang berbeda.

Dalam perkembangan selanjutnya, Singapura yang sejak semula berada dalam posisi sulit, akhirnya keluar dari Federasi Malaysia pada tanggal 7 Agustus 1965.

---

<sup>96</sup> Yahya Muhaimin. *op. cit*, hlm 114.

Keluarnya Singapura lebih didorong oleh alasan internal, yaitu sulitnya menerima kebijaksanaan rasial yang mewarnai pola pikir para pemimpin Malaysia. Penonjolan ras Melayu dan sifat monarkhi yang terbukti dengan adanya batasan hanya Sultan-Sultan Melayu yang dapat diangkat sebagai Yang Dipertuan Agung Malaysia berbeda secara mendasar dengan pola pikir para pemimpin Singapura. Ini dikarenakan sifat Singapura yang multirasial, yang lebih menonjolkan keanekaragaman atau kemajemukan ras sebagai anasir kebangsaan. Keluarnya Singapura merupakan pukulan berat bagi keberadaan Federasi Malaysia. Sehingga muncul kekhawatiran jika Singapura bergerak lebih jauh untuk mengadakan kerjasama lebih erat dengan Indonesia. Itulah sebabnya hal ini juga menjadi motivasi para *peace feelers* dari Malaysia untuk secepatnya mengusahakan penyelesaian konfrontasi.

### **2. Faktor Penghambat Normalisasi**

Faktor penghambat penyelesaian konfrontasi lebih banyak berasal dari Indonesia. Setelah gagal kudeta yang dilakukan PKI hingga keluarnya Supersemar, pemerintahan Presiden Sukarno masih berusaha untuk meneruskan politik konfrontatif. Sikap Presiden Sukarno sendiri secara formal masih tetap konsisten untuk melanjutkan penentangannya terhadap keberadaan Malaysia. Kabinet Dwikora yang telah dibentuk pada tahun 1964, walaupun telah dirombak pada bulan September 1965, tetapi namanya tetap disebut Dwikora.

Beberapa partai politik, organisasi massa dan bahkan sebagian dari kalangan ABRI masih tetap setia mendukung Presiden Sukarno dengan politik

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87

konfrontatifnya. Ketaatan ini dapat dimengerti, karena bila tidak demikian ABRI akan dianggap sebagai golongan yang kontrarevolusioner. Pendapat lain menyatakan, bahwa dukungan yang tetap dari ABRI terhadap konfrontasi berfungsi memperlihatkan sifat nasionalis terpercaya dan progresif dari angkatan bersenjata yang telah diserang oleh PKI maupun Presiden Sukarno sebagai "kapitalis demokrat". Dengan tetap mendukung konfrontasi memungkinkan ABRI menunjukkan kesetiiaannya pada negara dan bangsa.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang terbentuk pada bulan Oktober 1965, yang menuntut pembubaran PKI, perbaikan ekonomi dan mendesak perlunya penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, dibubarkan oleh Presiden Sukarno, karena dianggap mengganggu stabilitas nasional. Dengan alasan yang sama pula, Universitas Indonesia (UI) ditutup dan dibekukan kegiatannya pada bulan Maret 1966. Akan tetapi, secara mendasar dengan hilangnya PKI dari percaturan politik nasional, politik konfrontasi kehilangan daya dukungnya yang paling utama. Fungsi yang utamanya juga menurun. Politik tersebut ke dalam sudah tidak dapat lagi berfungsi mempersatukan bangsa dan menggugah semangat revolusioner, sedangkan keluar sudah tidak mampu berfungsi sebagai sarana "mengganyang Malaysia", karena telah kehilangan daya penggerakannya yang utama, yakni PKI.

Di pihak Malaysia, upaya damai tetap dirahasiakan dan tanpa sepengetahuan Tengku Abdul Rahman. Sampai saat datangnya misi muhibah dari Indonesia yang dikirimkan oleh Komando Ganyang Malaysia (Kogam), barulah secara resmi usaha ini diketahui oleh Tengku Abdul Rahman. Kenyataannya, setelah melihat

kedatangan rombongan dari Indonesia yang menawarkan perdamaian, Tengku Abdul Rahman langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Inggris yang merupakan pelindung keberadaan Federasi Malaysia pada mulanya juga sangat menentang, tetapi tetap tidak berdaya, karena para pemimpin Malaysia sudah bertekad untuk berdamai. Demikianlah faktor penghambat dari usaha normalisasi kedua negara. Namun begitu, dari semua faktor penghambat ini terasa tidak berarti dibandingkan niat dan tekad yang bersungguh-sungguh antara kedua belah pihak yang ingin merentang tali perdamaian dan kehidupan bertetangga baik antara dua negara yang serumpun.

### **3. Jalannya Usaha Normalisasi**

Usaha untuk menyelesaikan politik konfrontasi dengan Malaysia sekaligus menormalisasi hubungan kedua negara yang dimulai pada tahun 1964, dikendalikan secara langsung oleh Suharto yang pada waktu itu berpangkat Brigadir Jenderal. Posisi Suharto cukup tinggi, karena ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) yang merangkap jabatan Wakil Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam). Kemudian sebagai pelaksana secara fisik dipercayakan kepada Letkol. Ali Murtopo yang dibantu oleh Mayor L.B. Murdani, Letkol. A. Rahman Ramli dan juga Letkol. Sugeng Jarot yang sedang bertugas di Thailand sebagai atase militer Indonesia. Agar kontak-kontak awal dengan pihak Malaysia berjalan lancar diminta pula bantuan dari orang-orang sipil yang menjadi wiraswastawan yang sering melakukan hubungan dagang antara Jakarta, Kualalumpur, Singapura,

Bangkok dan Hongkong. Umumnya mereka ini pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI, yang oleh orang-orang awan sering disebut sebagai "orang-orang PSI". Beberapa dari mereka dapat disebutkan antara lain: Yerry Sumendap, Jan Walandow, Daan Mogot, Welly Pesik dan Des Alwi.<sup>97</sup>

Sebenarnya di Indonesia masin ada kelompok lain yang ditugaskan oleh Mayjen. Ahmad Yani, yakni kelompok Sukendro, Syarnubi Said dan Eddy Yahya. Tetapi, yang berhasil dalam usaha penjajagan damai adalah kelompok operasi khusus Suharto Ali Murtopo. Tentang perjalanan usaha kelompok Sukendro dan kawan-kawannya tidak banyak diketahui. Yang jelas, berkat perhitungan yang teliti, kejelian penglihatan, pengalaman dan mungkin berkat panca indera keenam masing-masing pihak, maka yang bertemu adalah kelompok Suharto-Ali Murtopo dengan kelompok Tun Abdul Razak dan Tan Sri Muhammad Ghazali. Jauh kemudian, dalam suatu wawancaranya dengan Hidayat Mukmin di tahun 1985, L.B. Murdani yang telah berpangkat Jenderal menyatakan : "Bayangkan, apa yang sekiranya terjadi dalam hubungan antara Indonesia dengan Malaysia bila mereka salah pilih, peta politik Indonesia mengkin akan tergambar lain".<sup>98</sup>

Operasi khusus di pihak Indonesia untuk mengusahakan penjajagan damai dengan Malaysia dimulai melalui Bangkok dengan cara yang rahasia agar tidak diketahui oleh Presiden Sukarno. Posisi Bangkok dianggap sangat mendukung, karena Thailand beraifat netral dalam peristiwa konfrontasi ini. Dan bagai pucuk dicinta ulam tiba ketika operasi khusus dari Indonesia bertemu dengan operasi

---

<sup>97</sup> Mukmin Hidayat. *op. cit*, hlm 117.

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm 119.

khusus dari Malaysia yang juga menginginkan penyelesaian konfrontasi diantara kedua negara.

Beberapa pertemuan pun dilakukan di beberapa hotel di Bangkok pada tahun 1964. Para *peace feelers* kedua belah pihak saling bertukar pikiran untuk membahas kemungkinan damai dan merencanakan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Usaha melalui Bangkok bertembah lancar, karena mendapat dukungan dari B.M. Diah yang bertugas sebagai duta besar di Thailand. Sementara L.B. Murdani telah ditempatkan di Bangkok menyamar sebagai pegawai pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways. Demikianlah pertemuan wakil kedua belah pihak terus berlanjut sampai kemudian terjadi pemberontakan G. 30 S/PKI pada akhir bulan September 1965.

Pemberontakan G. 30 S/PKI yang gagal namun telah menyebabkan terbunuhnya beberapa perwira TNI-AD secara keji, membuat suasana dalam negeri bergolak. Rakyat berdemonstrasi menggugat kepemimpinan Presiden Sukarno dan menuntut pembubaran PKI. Namun Presiden Sukarno tidak bergerak cepat dan bahkan mengesankan keengganannya untuk membubarkan PKI. Hingga akhirnya keluar Surat Perintah 11 Maret 1966 dengan Suharto yang telah berpangkat Letjend dipercaya sebagai pengembannya. Dengan Supersemar pula, PKI kemudian dibubarkan dan beberapa menteri ditahan karena didakwa terlibat dalam kup PKI. Lahirnya Supersemar di dalam negeri merupakan tonggak sejarah dimulainya perjuangan Orde Baru.<sup>99</sup> Bagi para pengamat luar negeri, Supersemar dianggap sebagai indikator terjadinya perubahan pemerintahan di

---

<sup>99</sup> Mukmin Hidayat. *op. cit*, hlm 131.

Indonesia. Kenyataannya memang dengan keluarnya Supersemar disusul dengan pergantian kekuasaan secara berangsur-angsur dari Sukarno ke Suharto.

Sejak keluarnya Supersemar, maka usaha damai sekaligus menormalisasi hubungan dengan Malaysia tidak lagi dilakukan secara rahasia, melainkan mulai diangkat ke permukaan dan bersifat terbuka. Di pihak lain, dengan keluarnya Supersemar itu pemerintah Malaysia semakin yakin bahwa upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia yang selama ini dianggapnya selalu konfrontatif dengan pihak Barat, mulai memperoleh dasar, dorongan dan legalitas politik.

Kedudukan Menteri Luar Negeri yang semula dijabat Subandrio digantikan oleh Adam Malik. Dalam suatu wawancaranya yang pertama di bulan April 1966 ia menyatakan perlunya politik luar negeri Indonesia yang disesuaikan dengan realitas dunia, membuka persahabatan seluas-luasnya dengan semua bangsa dan kesediaannya untuk berunding dengan Malaysia.<sup>100</sup> Adam Malik juga melakukan reorganisasi dan restrukturisasi kementerian luar negeri sekaligus membersihkannya dari anasir PKI. Untuk mempercepat usaha normalisasi dengan Malaysia, Adam Malik lebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Philipina, Narciso Ramos, di Bangkok. Dari pertemuan tersebut keduanya kemudian bersepakat untuk bersama-sama memperbaiki hubungan multilateral demi memelihara ketertiban di Asia Tenggara khususnya. Selain itu dibahas pula kemungkinan diadakannya perundingan untuk menyelesaikan masalah sengketa dengan Malaysia yang bertempat di Bangkok. Perdana Menteri Thailand, Thanat

---

<sup>100</sup> *Idem.*

Khoman ikut bergembira dengan perkembangan ini dan dengan senang hati akan membantu mempersiapkan kemungkinan perundingan di Bangkok.

Untuk menunjukkan niat baik Indonesia, Letjen. Suharto yang menjabat sebagai kepala staf Komando Ganyang Malaysia dan juga pengemban Supersemar merigirinkan sebuah misi muhibah ke Malaysia untuk bertemu dengan Tun. Abdul Razak dan Tengku Abdul Rahman pada khususnya. Misi yang dipimpin oleh Laksamana Muda Laut O.B. Syaaf beranggotakan 20 orang perwira militer dan beberapa wartawan.

Para *peace feelers* dari Malaysia menyambut gembira datangnya misi dari Indonesia. Namun, mereka juga khawatir, apakah misi ini dapat berjalan sukses dan diterima oleh Tengku Abdul Rahman. Satu hari sebelum kedatangan misi dari Indonesia, Tengku Abdul Rahman baru diberitahu mengenai usaha penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia dan normalisasi kedua negara. Tetapi, Tengku Abdul Rahman tidak mempercayainya. Begitu pula ketika pesawat Hercules akan memasuki wilayah udara Malaysia, para pejabat dan pegawai lapangan udara baru mengetahui akan datangnya pesawat dari Indonesia. Pada saat itulah pihak Inggris mengetahui adanya "hubungan gelap" antara Malaysia dengan Indonesia. Para pejabat militer Inggris segera melaporkan kepada kepala perwakilan Inggris di Kuala Lumpur. Akibatnya terjadi dialog sengit antara kepala perwakilan Inggris dengan Tan Sri Muhammad Ghazali. Dalam dialog yang cukup seru itu, dijelaskan pula bahwa pesawat dari Indonesia pada hari itu akan berangkat ke Kedah untuk menemui Tengku Abdul Rahman melalui Butterworth, yakni pangkalan udara militer Inggris dan Australia. Kepala perwakilan Inggris semakin marah dan mengancam akan menembak pesawat tersebut jika melalui

Butterworth. Tetapi dengan berani Tan Sri Muhammad Ghazali mempersilahkan untuk menembak, dengan catatan bahwa ia juga akan berada dalam pesawat tersebut, sehingga jika pesawat ditembak, maka ia akan turut menjadi korban. Pihak Inggris akhirnya tidak berdaya dan pesawat yang membawa misi dari Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya dengan lancar. Pesawat akhirnya mendarat di Kedah tanpa suatu insiden apapun. Misi dari Indonesia ini disambut sangat meriah oleh ribuan rakyat yang telah dikerahkan sebelumnya. Dari sambutan yang sangat meriah membuat suasana seolah-olah permusuhan selama itu terhapus sama sekali. Di antara yang paling gembira adalah Tengku Abdul Rahman sendiri, yang selama itu tidak mempercayai iktikat baik Indonesia, tetapi tiba-tiba muncul di depannya rombongan militer musuh yang ingin berdamai.<sup>101</sup> Dari sambutan yang menggembirakan, terutama dari Tengku Abdul Rahman menunjukkan, bahwa misi telah berjalan sukses untuk "melunakkan hati" sang arsitek Federasi Malaysia yang konon "berhati keras" untuk mempertahankan segala pendapatnya. Keberhasilan misi ini kemudian membuka jalan ke arah perundingan di Bangkok yang merupakan perundingan resmi pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam usahanya untuk menormalisasi hubungan kedua negara.

Perundingan di Bangkok berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Walaupun kedua delegasi datang dengan semangat persahabatan dan penuh harap akan segera selesainya konfrontasi, tetapi di Bangkok tetap terjadi perbedaan pendapat, terutama mengenai masalah Sabah dan Sarawak. Setelah melalui

---

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm 134.

perundingan yang cukup seru, akhirnya diperoleh kesepakatan, bahwa kedua belah pihak tidak akan terlalu "pagi" mengikatkan diri pada penyelesaian status Sabah dan Sarawak sebagai prasyarat normalisasi kedua negara.

Hasil perundingan di Bangkok segera disetujui oleh pemerintah Malaysia. Walaupun perundingan di Bangkok masih mengandung beberapa masalah mendasar, Tun Abdul Razak sebagai ketua delegasi Malaysia menyatakan secara diplomatis bahwa perundingan di Bangkok telah meletakkan landasan perdamaian.<sup>102</sup> Pihak Indonesia sendiri baru bersedia menerima hasil perundingan Bangkok pada tanggal 30 Juli 1966, karena sebelumnya masih dihalang-halangi oleh Presiden Sukarno. Meskipun Presiden Sukarno tetap bersikeras bahwa konfrontasi harus diteruskan, tetapi suaranya sudah tidak lagi menentukan dalam proses pengambilan keputusan nasional. Wibawanya semakin menurun sehingga Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Sukarno, dan pada tanggal 12 Maret 1967 mengangkat Suharto yang telah berpangkat Jenderal menjadi Pejabat Presiden. Menarik sekali untuk mengamati sikap Presiden Sukarno yang tetap ingin meneruskan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Tetapi sebenarnya masih perlu dikaji lebih jauh dan mendalam, apakah benar ia tidak sedikit pun berkeinginan untuk menyelesaikan konfrontasi? Sekali lagi, hal ini masih perlu dikaji lebih jauh. Soalnya dalam suatu wawancara antara Hidayat Mukmin dengan Brigjend. Sugih Arto pada tanggal 14 Januari 1987, diperoleh keterangan bahwa Sugih Arto pernah dikirim secara khusus oleh Presiden Sukarno ke London untuk penjajagan damai. Dikatakan bahwa Presiden Sukarno

---

<sup>102</sup> Mackie, J.A.C. *op. cit* hlm 320.

sebenarnya juga ingin menyelesaikan konfrontasi walaupun secara diam-diam. Syaratnya, harus dengan cara yang terhormat bagi semua pihak dan tidak menjatuhkan namanya. Lebih jauh ia menginginkan agar prakarsa damai tidak datang dari Indonesia atau Malaysia, melainkan dari Inggris. Untuk inilah maka Brigjend. Sugih Arto dikirim sendirian pada tahun 1964 untuk usaha penjajagan damai. Penugasan yang sifatnya rahasia ini ternyata menemui kegagalan karena tidak mendapat jawaban dari Inggris.

Setelah kedua belah pihak menyetujui hasil perundingan di Bangkok, saat-saat yang bersejarah pun tiba. Saat itu adalah ketika diresmikannya persetujuan Normalisasi hubungan kedua negara yang ditandatangani kedua negara pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Hadir dalam peristiwa itu beberapa tokoh seperti Adam Malik, selaku Menteri Luar Negeri, Jenderal Suharto, selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera, beberapa *peace feelers*, serta beberapa pejabat Departemen Luar Negeri. Sedangkan dari Malaysia hadir antara lain Tun Abdul Razak selaku Deputy PM/Menteri Pertahanan, Tan Sri Ghazali Shafei, beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan para tokoh dari Angkatan Bersenjata. Inti dari Persetujuan Normalisasi tersebut adalah bahwa kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serawak untuk menegaskan kembali keputusan yang telah diambil sebelumnya tentang keikutsertaannya ke dalam Federasi Malaysia melalui pemilu yang bebas demokratis. Selain itu, permusuhan kedua negara akan dihentikan dan kedua pemerintahan setuju untuk segera memulihkan hubungan diplomatik.<sup>103</sup> Dengan

---

<sup>103</sup> Mukmin Hidayat. *op. cit*, hlm 139.

ditandatanganinya Persetujuan Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966, maka berakhirilah Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.

## **B. Arah Baru Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca 1966.**

Memasuki era Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan untuk membenahi penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama. Dengan konsolidasi yang efektif di bawah pimpinan Jenderal Suharto, pola praktek politik luar negeri yang revolusioner dan berkesan semarak dikurangi. Landasan politik luar negeri ditegaskan kembali pada tanggal 1 Juli 1966 melalui sidang umum MPRS yang mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, yang isinya antara lain :

1. Sifat Politik Luar Negeri Indonesia, yakni:
  - a. Bebas Aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  - b. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.
2. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mempertahankan Indonesia dari imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ketiga sendi tujuan revolusi, yaitu:

- a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

- b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia tersebut.
- c. Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Ketetapan ini kemudian diperkuat oleh Nota I/MPRS/1966 pada tanggal yang sama tentang "politik luar negeri berdasarkan Pantja Sila", yang merupakan nota ketua MPRS kepada ketua DPR. Isi ketetapan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Misalnya di dalam isi terdapat tiga kerangka tujuan revolusi Indonesia. Dengan demikian Ketetapan MPRS no. XII,/ MPRS/1966 serta nota ketua MPRS hanya merupakan penegasan kembali dan tidak untuk memberikan rumusan baru bagi politik luar negeri Indonesia. Sedangkan yang perlu diketahui, bahwa yang dianggap menyeleweng oleh MPRS adalah pelaksanaan politik luar negeri yang telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Yang tersirat sebagai kebijaksanaan baru adalah upaya untuk mengakhiri konfrontasi dan penyelesaian masalah Malaysia melalui perundingan.

Kemudian yang dimaksud dengan arah baru kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia pasca 1966 adalah mengenai praktek dan sifat pelaksanaannya. Jadi, yang merupakan hal baru adalah perubahan dalam gaya, dan bukan perubahan dalam formula prinsip yang telah dikemukakan oleh Hatta pada tanggal 2 September 1948.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Michael Leifer. *op. cit*, hlm 162.

Perubahan ini terutama disebabkan oleh kepemimpinan Jenderal Suharto yang mengambil alih dari tangan Presiden Sukarno. Pemimpin baru ini mempunyai penampilan umum yang sangat berbeda dengan Sukarno. Ia lebih bersifat tenang, berhati-hati dan tidak menampilkan kualitas personal seperti yang memungkinkan Sukarno mendominasi kehidupan politik dengan mempertahankan terus dalam keadaan bergejolak.<sup>105</sup>

Ia juga mengganti tujuan politik luar negeri Sukarno yang "penuh kebesaran dan megah" dengan tujuan yang lebih bersahaja dan praktis, seperti mempererat hubungan dan kerjasama antar bangsa, terutama dengan negara-negara Asia-Afrika dan Non Blok dengan penciptaan stabilitas kawasan dan kerjasama di Asia Tenggara sebagai prioritas pertama.<sup>106</sup> Pada kesempatan lain, Jenderal Suharto menyatakan, bahwa bentuk penyelewengan yang utama pada masa Orde Lama adalah pelaksanaannya yang tidak realistis dan pragmatis karena dititikberatkan kepada politik luar negeri mercusuar tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat yang mendesak. Di samping itu politik luar negeri yang "poros-porosan" jelas bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan bertentangan dengan kepentingan nasional, serta telah menimbulkan tabir kecurigaan dan keraguan yang memisahkan Indonesia dari teman-teman seperjuangan, khususnya dengan negara-negara Non Blok

Setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berhasil diselesaikan dengan penandatanganan persetujuan normalisasi kedua negara pada tanggal 11 Agustus 1966, Adam Malik muncul sebagai seorang tokoh politik luar negeri Indonesia

---

<sup>105</sup> Michael Leifer. *op. cit*, hlm 163.

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm 171.

menggantikan Subandrio. Beberapa saat setelah ia diangkat menjadi menteri luar negeri, ia menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi kebijaksanaan luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya, dan dituntun oleh realitas-realitas yang ada di dunia luar. Selain itu ia juga mengatakan, bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan bukan sebaliknya.

Bagi pemerintah Indonesia, keputusan untuk menormalisasi hubungan dengan Malaysia lebih jauh merupakan keputusan politik dengan pertimbangan perlunya stabilitas politik dalam negeri. Stabilitasnya politik dalam negeri, akan berdampak positif pula terhadap stabilitas Asia Tenggara. Selain itu Indonesia juga akan dapat melakukan peranan yang lebih besar dalam politik global. Di sisi lain, stabilnya wilayah Asia Tenggara merupakan modal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Politik konfrontasi terhadap Malaysia telah menyebabkan pembangunan nasional terbengkalai.

Selanjutnya, pada bulan September 1966 Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Masuknya Indonesia sebagai anggota PBB berlangsung lancar tanpa melalui prosedur yang sulit, karena di dalam piagam PBB tidak dicantumkan suatu peraturan yang memperkenankan atau melarang pengunduran diri suatu negara anggota dari organisasi tersebut.<sup>107</sup> Hubungan dengan negara-negara lain yang semula kurang harmonis dibenahi kembali.

Hubungan dengan RRC dibekukan, karena keterlibatan langsung negara ini dalam kudeta G. 30 S/PKI. Konsulat RRC menjadi sasaran demonstrasi dan

---

<sup>107</sup> Roeslan Abdulgani. 1963. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Jakarta : Prapanca, hlm15.

akhirnya ditarik pada bulan Desember 1965. Demikian pula poros Jakarta-Peking-Pyong Yang dihapuskan dan staf Kedutaan Besar Indonesia juga ditarik dari Peking. Adam Malik menggunakan istilah "pembekuan" untuk menggambarkan keadaan hubungan diplomatik antara kedua negara dan membuka kemungkinan normalisasi pada masa yang akan datang. Begitu pula hubungan dengan Uni Soviet pada tahun 1966-1967 menjadi dingin karena negara ini memberikan suaka politik kepada para pelarian PKI.

Dengan negara-negara blok Barat diusahakan terciptanya kerjasama yang saling mendukung bagi kedua belah pihak. Penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia menjadi pendorong pulihnya hubungan dengan negara-negara blok Barat, terutama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Dengan negara-negara kelompok Asia-Afrika dan Non Blok dijalin kembali persahabatan yang lebih erat.

Arah baru kebijaksanaan politik luar negeri juga tercermin dalam perubahan dari "prioritas politik" pada masa Orde Lama ke "prioritas ekonomi" pada masa Orde Baru. Melalui pembangunan di bidang ekonomi, diharapkan prestasi di bidang politik dapat juga dicapai. Menteri Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sri Sultan Hamengkubuwono, mendukung hal ini, seperti dalam pernyataannya kepada pers pada bulan April 1966, bahwa pemerintah Indonesia akan menyambut setiap bantuan ekonomi asing tanpa ikatan politik dari semua negara.<sup>108</sup> Ini dilakukan untuk memperbaiki perekonomian yang merosot di masa sebelumnya.

---

<sup>108</sup> Michael Liefer. *op. cit.*, hlm 168

Setelah konfrontasi dengan Malaysia berhasil diselesaikan dan hubungan dengan negara-negara lain diperbaiki, maka mengalirlah bantuan maupun kerjasama ekonomi dari beberapa negara. Sebagai contoh, beberapa kreditur Barat membentuk *Intern Governmental Group on Indonesia* (IGGI), sebagai wadah untuk membantu perekonomian Indonesia. Selama periode tahun 1966-1967 bantuan banyak berasal dari negara-negara blok Barat dan Jepang. Menanggapi hal ini Jenderal Suharto sebagai pejabat presiden mengatakan, walaupun bantuan ekonomi banyak diterima dari blok Barat, tetapi jangan diartikan bahwa Indonesia menutup pintu bagi bantuan yang berasal dari blok Timur.<sup>109</sup> Pernyataan ini kiranya untuk menegaskan kembali keinginan pemerintah Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif sesuai pada tempatnya. Bantuan dan kerjasama dari negara manapun akan diterima dengan tangan terbuka asalkan dilandasi prinsip saling menghargai dan tidak mendiskreditkan negara lain atau blok tertentu. Adam Malik menerangkan, bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada masa Orde Baru memang sangat baik dan negara ini merupakan salah satu penyumbang penting di bidang ekonomi, walaupun demikian pemerintah Indonesia tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat.<sup>110</sup>

Kebijaksanaan luar negeri Indonesia pasca 1965 lebih jauh lagi diarahkan untuk membina kerjasama antar bangsa, terutama kerjasama regional di lingkup Asia Tenggara. Keinginan ini telah dibicarakan selama berlangsungnya perundingan bilateral informal antara Indonesia dengan Malaysia di samping pembicaraan tentang penyelesaian konfrontasi kedua negara. Untuk hal ini Adam

---

<sup>109</sup>*Ibid.* hlm 182.

<sup>110</sup> Adam Malik. 1978. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta : Yayasan Idayu, hlm 26.

Malik juga telah mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh dari Philipina dan Thailand. Sebelumnya, Philipina, Thailand dan Malaysia telah membentuk *Association of South East Asia (ASA)* pada tahun 1961 yang bertujuan untuk membendung aliran komunis. Indonesia pernah diberi kesempatan untuk menjadi salah satu anggotanya, tetapi menolak karena itu berarti menyalahi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif yang tidak memihak salah satu blok dunia. Kenyataannya, keberadaan ASA banyak menemui kendala karena adanya permusuhan antara Philipina dengan Malaysia mengenai masalah Sabah. Akan tetapi, sebenarnya ada juga keinginan di antara kedua negara untuk mengembalikan hubungan baik demi kestabilan wilayah Asia Tenggara. Ini terlihat sebelum berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia secara resmi, pemerintah Philipina, Malaysia dan juga Thailand telah bersepakat untuk menghidupkan kerjasama di kawasan Asia Tenggara.

Dari pihak Indonesia, Jenderal Suharto menyatakan pula ketertarikannya terhadap kerjasama regional ini, seperti yang telah dinyatakannya di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1966 sebagai berikut:

"Apabila masalah Malaysia ini telah diselesaikan, kita dapat mengarah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerjasama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kita kemudian akan menghidupkan kembali gagasan Maphilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerjasama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, teknik dan budaya".<sup>111</sup>

Keinginan tersebut akhirnya terwujud ketika pada tanggal 8 Agustus 1967 berhasil ditandatangani deklarasi pembentukan *Association of South East Asian*

---

<sup>111</sup> Michael Liefer. *op. cit*, hlm 173.

*Nations* (ASEAN). Pada saat pembentukannya ASEAN beranggotakan lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. ASEAN merupakan suatu wadah kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adam Malik juga merasa perlu untuk menjelaskan, bahwa partisipasi Indonesia dalam pembentukan ASEAN tidak berarti pemerintah akan menyimpang dari kebijaksanaan luar negerinya yang bebas aktif.<sup>112</sup> Maka bukan suatu kebetulan bahwasanya ASEAN terbentuk dengan beranggotakan lima negara yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konfrontasi sebelumnya. Keterlibatan tersebut dapat berupa musuh, maupun sebagai katalisator atau mediator. Dapat pula disimpulkan, bahwa perubahan dalam sistem politik di Indonesia telah menjadi pendorong timbulnya kesesuaian politik yang sebelumnya tidak ada ketika ASA dibentuk pada tahun 1961.

Demikianlah pada masa pemerintahan Orde Baru ditegaskan kembali rumusan mengenai politik luar negeri yang bebas aktif yang pada masa Orde Lama menyeleweng, terutama karena adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Politik luar negeri bebas aktif diusahakan untuk diterapkan sesuai pada tempatnya, sesuai dengan kepentingan nasional. Kerjasama dengan berbagai bangsa mulai dipupuk seluas mungkin dengan prinsip saling menghormati dan hidup bertetangga yang baik dengan tidak menghentikan untuk selalu berperan penting dalam usaha untuk mewujudkan tatanan dunia yang sejahtera penuh perdamaian dan bebas dari imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

---

<sup>112</sup> Michael Liefer. *op. cit*, hlm 177.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966 (suatu kajian histories)”, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1. Apa yang menjadi landasan, dasar hukum dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sampai munculnya orde baru, 2. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia, 3. Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia. Disini pun dapat ditarik tiga hipotesis sebagai berikut: 1. Jika landasan dan dasar hukum politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 maka Indonesia menjadi negara yang netral dalam percaturan politik dunia. 2. Jika Malaysia membentuk federasi Malaysia maka Indonesia akan menentang keberadaan federasi ini karena dianggap ciptaan kolonialis baru yang mengganggu dan menghambat jalannya revolusi Indonesia. 3. Kalau konfrontasi Indonesia Malaysia tetap berlanjut berdampak bagi situasi politik maupun perekonomian di Indonesia maka memasuki orde baru pemerintah Indonesia berusaha meluruskan kembali politik luar negeri yang mengalami penyelewengan pada masa orde lama, hal ini dilakukan karena politik konfrontasi yang dilakukan pada masa orde lama dianggap tidak menguntungkan oleh kedua belah pihak bahkan untuk masyarakat Indonesia hal ini mengganggu stabilitas dalam negeri.

Setelah mengadakan studi kepustakaan dan membaca uraian yang tercantum pada bab II, III, IV, yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atau jawaban atas permasalahan yang telah diangkat bahwa hipotesis terbukti/tepat, sebagai berikut:

1. Landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasar hukumnya adalah Pancasila khususnya sila ke 2, pidato Hatta yang disampaikan di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tahun 1948 tentang politik luar negeri bebas aktif, dan ketetapan MPR/MPRS karena lingkup skripsi ini sampai munculnya orde baru maka yang penulis sebutkan adalah ketetapan MPRS no.1/MPRS/1960 tentang Manipol Usdek dan ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali politik luar negeri bebas aktif. Adapun prinsip politik luar negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok yang sedang bertikai dalam perang Dingin. Politik “bebas” bukan berarti netral, karena kata “bebas” diberi tambahan kata “aktif” yang berarti giat atau aktif mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Tetapi dalam pelaksanaannya politik luar negeri Indonesia pernah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan bergesernya sifat bebas aktif menjadi politik konfrontatif kepada Malaysia, yang menyebabkan Indonesia bersekutu dengan Republik Rakyat Cina (RRC), hal ini diperjelas lagi dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB.

2. Latar belakang konfrontasi Indonesia Malaysia diawali dengan dibentuknya federasi Malaysia yang bertujuan menciptakan perimbangan antara penduduk suku Melayu dengan suku Cina maksudnya agar kehidupan suku Melayu yang

merupakan penduduk asli lebih terjamin, selain itu pembentukan federasi ini untuk memperkuat perekonomian dan sekaligus sistem pertahanan dapat dikelola bersama antara Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai. Pemerintah Indonesia tidak menerima pembentukan federasi Malaysia dengan alasan bahwa federasi tersebut merupakan suatu bentuk neokolonialisme yang diciptakan Inggris yang bertujuan menghambat revolusi Indonesia. Indonesia mulai condong ke Blok timur yang dipimpin oleh Cina kemudian Indonesia juga keluar dari keanggotaan PBB.

3. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang menyeleweng dari prinsip bebas aktif karena peristiwa konfrontasi dengan Malaysia kemudian mulai dibenahi. Pemerintahan orde baru mengeluarkan ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali politik luar negeri yang bebas aktif, dengan catatan yang dianggap menyeleweng adalah pelaksanaannya. Poros Jakarta – Peking dihapuskan kemudian Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Hubungan dengan RRC dibekukan karena keterlibatan negara ini dalam peristiwa G. 30 S/PKI. Di lain pihak hubungan dengan negara lain mulai dibenahi kembali, pemerintah orde baru bertekad akan membina kerjasama antar bangsa yang lebih baik atas dasar politik luar negeri bebas aktif dengan dasar saling menghormati kedaulatan masing-masing. Keinginan ini terwujud dengan dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 yang merupakan bentuk kerjasama di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

**Sumber Buku :**

- Abdulgani, Roeslan.  
1963. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Jakarta : Prapanca.
- Adam Malik.  
1978. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta : Yayasan Idayu
- Budiono Kusumohamidjojo.  
1987. *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*, Bandung : Bina Cipta.
- Deliar Noer.  
1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta : LP3ES
- Departemen Penerangan RI.  
1959. *Manifestasi politik Republik Indonesia*. Jakarta : Departemen PeneranganRI.
- 
1964. *Gelora Konfrontasi Mengganyang Malaysia*. Jakarta : Departemen Penerangan RI.
- Djanwar.  
1986. *Mengungkap Penghianatan/Pemberontakan G. 30 S/PKI*. Bandung : CV Yrama.
- Dudi Singadilaga.  
1973. *Politik Luar Negeri Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Feith, Herbert & Lance Castles (ed).  
1988. *Indonesian Political Thingking 1945-1965*. Jakarta.
- Fernandes, Frans S.  
1988. *Hubungan internasional dan Peranan Bangsa Indonesia, Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Dekdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Gottschalk, Louis.  
1983. *Understanding History : A Primer of Historical Method*, Jakarta : UI Press.
- Hidayat Mukmin.  
1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*. Jakarta : Pustaka Harapan
- Ide Anak Agung, Gde Agung.  
1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris : Mouton & Co.
- Kuntowijoyo.  
1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Yayasan Benteng Budaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar.  
1982. *“Bung Hatta Peletak Dasar Politik Luar Negeri Kita” dalam Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Idayu.

- 
1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung : Alumni.
- Legge, J.D.  
1985. *Sukarno A Political Biography*. Terjemahan Tim PSH. *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Lemhanmas.  
1981. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Liefer, Michael.  
1989. *Indonesia's Foreign Policy*. Terjemahan A. Ramlan Surbakti. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Mackie, J.A.C.  
1974. *Konfrontasi The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. Kuala Lumpur : Oxford University Pers.
- Moedjanto, Gregorius.  
1988. *Indonesia Abad Ke 20 jilid 1: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*. Yogyakarta : Kanisius (anggota IKAPI).
- 
1988. *Indonesia Abad Ke 20 jilid 2: Oerang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta : Kanisius (anggota IKAPI).
- Mohammad Hatta & Ide Anak Agung Gde Agung.  
1987. *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung : Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur*. Jakarta : Tintamas Indonesia.
- 
1946. *Dasar Politik Luar Negeri kita*. Yogyakarta : Negara.
- 
1976. *Mendayung di antara Dua Karang*. Jakarta : Bulan Bintang
- Nana Sudjana.  
1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru.
- Nasution, A.H.  
1988. *Memenuhi Panggilan Tugas "6", Masa Kebangkitan ORBA*. Jakarta : CV Haji Mas Agung.
- Nazaruddin Syamsudin, (ed).  
1988. *Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : Rajawali
- Nugroho Notosusanto.  
1971, *Norma-norma dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta : Departemen HANKAM.
- Poerwodarminto, W.J.S.  
1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prawirasaputra Sumpeno.  
1984, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Bandung : Remaja Karya.
- Ricklefs, M.C.  
1991. *A History of Modern Indonesia*. Terjemahan Dharmono Harjowidjono. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ryan, N.J.

1969. *The Making of Modern Malaysia and Singapore, a History from Earliest Times to 1966*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Sabir, M.

1987. *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta : CV Haji Mas Agung.

Sartono Kartodirjo.

1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

---

1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syamsudin Hadi & A.R. Soetopo peny....

1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dikawasan Asia Pasifik*. Jakarta : CSIS.

Yahya Muhaimin dkk....

1985, *Kamus Istilah Politik*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

---

1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

**Sumber Majalah dan Surat Kabar :**

Hilman Adil.

1977. *Beberapa Segi Politik Bertetangga Baik antara Indonesia dengan Australia*. PRISMA No. 9. Tahun VI.

Soedjati Djiwandono.

1985. *Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia : Perubahan dan Kesenambungan*. ANALISA no. 8.

Redaksi PRISMA.

1977. *Politik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan dari Sukarno sampai Suharto*. PRISMA No. 9 Tahun VI

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT - PERINTAH

I. *Mengingat:*

- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
- 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi/ pada tanggal 8 Maret 1966.

II. *Menimbang:*

- 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannya Revolusi.
- 2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannya.

III. *Memutuskan/Memerintahkan:*

*Kepada* : LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGlima ANGKATAN DARAT.

*Untuk* : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannya Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan

Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

111

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR  
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

ttd.

SUKARNO

Sumber: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1978. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Buku Ke-3 1966-1975, hlm 568 Jakarta.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### KOMANDO AKSI SUKARELAWAN

Kami Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam rangka politik Konfrontasi terhadap Proyek Neokolonialis „Malaysia”, yang nista-njasta merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia;

Setelah berulang kali berhitung untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan „Malaysia” menjapai penyelesaian dengan mesjwarah setjara kekeluargaan Asia;

Setelah njata pula bahwa iehlar-iehtjar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya, dengan ini kami perintahkan pada dua puluh satu djuta Sukarelawan Indonesia yang telah menjatuhkan diri:

**„PERKEBAT KETAHANAN REVOLUSI INDONESIA DAN BANTU PERJUANGAN REVOLUSIONER RAKJAT-RAKJAT MALAYA, SINGAPURA, SABAH, SERAWAK DAN BRUNAI UNTUK MEMBUBARKAN NEGARA BONEKA „MALAYSIA”.**

Semoga Taahmat dan Taatik Tuhan beserta kita

Djakarta, 3 Mei 1961

PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA

SUKARNO

Lampiran III

AGREEMENT TO NORMALISE RELATIONS 114  
between  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
and  
MALAYSIA

Recognising the need for close and friendly relations between Indonesia and Malaysia and create a climate conducive to cooperation between the two countries, in the spirit of the Manila Agreement and of brotherliness between the two peoples bound together by history and culture from time immemorial,

THE REPUBLIC OF INDONESIA  
and  
MALAYSIA

have decided to conclude an Agreement to normalize relations between the Republic of Indonesia and Malaysia and to this end have appointed as their plenipotentiaries:

for the Government of the Republic of Indonesia:

His Excellency Mr. Adam Malik, Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs, Republic of Indonesia,

for the Government of Malaysia:

His Excellency Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Deputy Prime Minister/Minister for Defence, Malaysia.

who, having examined each other's credentials and having found them and in due form have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Government of Malaysia in order to resolve the problems

between the two countries arising out of the formation of Malaysia, agrees to afford the people of Sabah and Sarawak who are directly involved, an opportunity to reaffirm, as soon as practicable, in a free and democratic manner through General Elections, their previous decision about their status in Malaysia.

115

ARTICLE 2

The Government of the Republic of Indonesia in its desire for close cooperation and friendship between Indonesia and Malaysia, agrees, and the Government of Malaysia concurs, that diplomatic relations between the two countries shall be established immediately and that they shall exchange diplomatic representation as soon as possible.

ARTICLE 3

The Government of the Republik of Indonesia and the Government of Malaysia agree that in view of the above, hostile acts between the two countries shall cease forthwith.

ARTICLE 4

This Agreement shall come into force on the date of signature.  
This in witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by the respective Governments, have signed this Agreement.  
Done at Djakarta in duplicate, this eleventh day of August, 1966.-

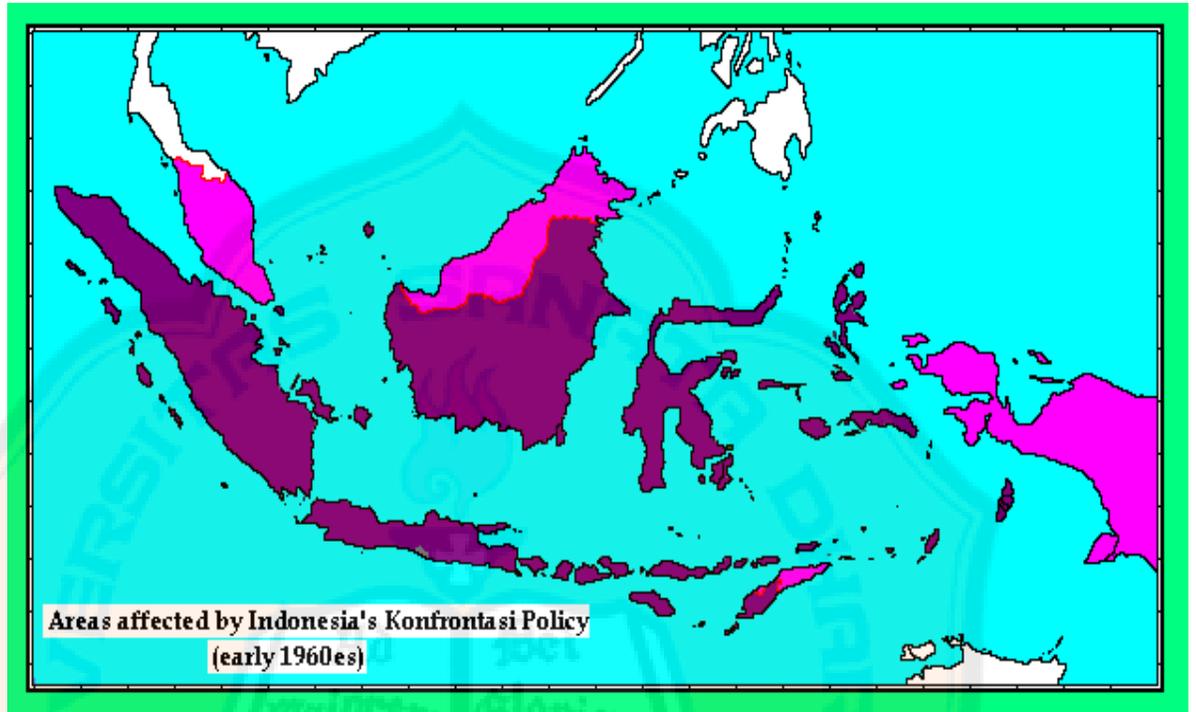
For the Government of the  
Republic of Indonesia

For the Government of  
Malaysia

Signed

Signed

ADAM MALIK      TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN



Sumber : [http://wiki\\_chainofthoughts\\_com](http://wiki_chainofthoughts_com) images  
ms250px\_locationIndonesia\_svg\_png.mht



Pidato Presiden Soekarno dihadapan ratusan ribu sukarelawan Dwikora tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta

Sumber : [http://jhosbastian\\_files\\_wordpress\\_com-2007-10-28\\_jpg.mht](http://jhosbastian_files_wordpress_com-2007-10-28_jpg.mht)

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

Nama Sekolah : SMA  
Mata Pelajaran : Sejarah  
Kelas/Semester : XI / 2  
Waktu : 1 x 45 menit

**I. Standar Kompetensi**

Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

**II. Kompetensi Dasar**

Kemampuan mendeskripsikan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.

**III. Indikator**

1. Menjelaskan landasan, dasar hukum dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia sampai munculnya orde baru tahun 1966.
2. Menjelaskan latar belakang dan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.
3. Menjelaskan tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia.
4. Menemukan makna dari konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.

**IV. Materi Pokok**

1. Landasan, dasar hukum dan prinsi politik luar negeri Indonesia sampai tahun 1966.
2. Latar belakang dan proses konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.

3. Sikap dan Tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia.
4. Merefleksikan dan menemukan makna dari konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966, bagi perkembangan negara Indonesia dewasa ini.

## V. Langkah Pembelajaran

### A. Kegiatan pendahuluan

1. Presensi.
2. Bertanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia.
3. Mendeskripsikan secara singkat bahan ajar yang akan dipelajari.

### B. Kegiatan inti

1. Siswa dibagi dalam 6 kelompok diskusi, setiap kelompok diskusi beranggotakan 6-7 siswa.
2. Guru memberikan soal yang akan menjadi bahan diskusi kelompok.  
Contoh soal diskusi :
  - Jelaskan landasan, dasar hukum, dan prinsip politik luar negeri Indonesia samapai tahun 1966!
  - Jelaskan latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966!
  - Deskripsikan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966!
3. Siswa diminta untuk berdiskusi selama 20 menit.
4. Siswa yang telah berdiskusi diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di muka kelas.
5. Tanggapan atau pertanyaan dari siswa lain atau kelompok lain yang sedang tidak presentasi.
6. Penguatan atau informasi tambahan dari guru.

## C. Kegiatan akhir

1. Guru menyimpulkan hasil diskusi.
2. Pemberian tugas rumah atau PR dari guru.

## VI. Alat, Media dan Sumber Belajar

1. Kartu yang digunakan untuk membagi siswa dalam kelompok diskusi.
2. Gambar, tabel dan bagan yang berkaitan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.
3. Departemen Penerangan RI. 1959. *Manifestasi politik Republik Indonesia*. Jakarta : Departemen PeneranganRI.
4. Departemen Penerangan RI 1964. *Gelora Konfrontasi Mengganyang Malaysia*. Jakarta : Departemen PeneranganRI.
5. Mohammad Hatta1946. *Dasar Politik Luar Negeri kita*. Yogyakarta : Negara.
6. A.H. Nasution 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas “6”, Masa Kebangkitan ORBA*. Jakarta : CV Haji Mas Agung.
8. M.C. Ricklefs, 1991. *A History of Modern Indonesia*. Terjemahan Dharmono Harjowidjono. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
9. Gregorius Moedjanto,. 1988. *Indonesia Abad Ke 20 jilid 1: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*. Kanisius (anggota IKAPI), Yogyakarta.
10. Buku Sejarah yang relevan.

## VII. Penilaian

1. Penilaian proses  
Jenis tagihan : Skala nilai  
Bentuk tagihan : Format penialaian

No.	Nama	Keg	Presentasi	Mengemukakan Pendapat	Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan	Skor
1						
2						
3						
4	Dst....					

2. Penilaian hasil

Jenis tagihan : Tugas

Bentuk tagihan : Uraian

- Jelaskan landasan, dasar hukum, dan prinsip politik luar negeri Indonesia samapai tahun 1966!
- Deskripsikan latar belakang dan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966!
- Jelaskan Sikap dan Tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia.
- Apa saja makna yang dapat diambil dari peristiwa konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966?

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 28 Agustus 2008  
Guru Mata Pelajaran

Nama  
NIP.

Agus Budi Yulianto

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Satuan Pendidikan : SMA  
 Kelas/semester : XI/2  
 Tahun Pelajaran : 2007/2008  
 Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Penilaian			Waktu	Sumber
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
mendeskripsikan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.	A. Landasan, dasar hukum dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia sampai munculnya orde baru tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat mendeskripsikan tentang landasan, dasar hukum, dan prinsip pelaksanaan politik luar negeri Indonesia</li> </ul>	Siswa dapat mendeskripsikan landasan, dasar hukum, dan prinsip pelaksanaan politik luar negeri Indonesia	Tugas, siswa di bagi dalam 6 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6-7 siswa. Siswa kemudian berdiskusi mengerjakan soal uraian.	Uraian dan laporan tertulis	1. Jelaskan landasan, dasar hukum, dan prinsip pelaksanaan politik luar negeri Indonesia	2 x 45 menit	Departemen Penerangan RI. 1959. <i>Manifestasi politik Republik Indonesia.</i> Jakarta : Departemen

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>1966.</p> <p>B. Latar belakang dan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat mendeskripsikan tentang latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966</li> </ul>			<p>2.Deskripsikan latar belakang dan proses terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966</p>	<p>PeneranganRI.</p> <p>Departemen Penerangan RI 1964. <i>Gelora Konfrontasi Mengganyang Malaysia.</i> Jakarta : Departemen PeneranganRI.</p> <p>Mohammad Hatta1946. <i>Dasar Politik Luar Negeri kita.</i> Yogyakarta1946 Negara.</p>
--	---	--	---	--	--	---	--

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>C. Tindakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat mendeskripsikan tentang sikap pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia</li> <li>Siswa dapat menemukan makna dari peranan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa dapat mendeskripsikan sikap pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia</li> <li>Siswa dapat menemukan makna dari konsep politik luar negeri bebas aktif</li> </ul>	<p>Test mengerjakan soal uraian</p>	<p>Uraian</p>	<p>3. Sebut dan Jelaskan tentang sikap pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Malaysia</p> <p>4. Apa saja makna yang dapat diteladani dari peristiwa konfrontasi Indonesia</p>	<p>A.H. Nasution 1988. <i>Memenuhi Panggilan Tugas "6", Masa Kebangkitan ORBA</i>. Jakarta : CV Haji Mas Agung. 125</p> <p>M.C. Ricklefs, 1991. <i>A History of Modern Indonesia</i>. Terjemahan Dharmono Harjowidjono. <i>Sejarah</i></p>
	<p>D. Merefleksikan dan</p>						

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	menemukan makna dari konsep politik luar negeri bebas aktif dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.	Malaysia tahun 1963-1966. Yang dianggap sebagai bentuk penyelewang politik luar negeri Indonesia yang jauh dari prinsip bebas aktif	dalam konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963-1966.			Malaysia tahun 1963-1966.	<i>Indonesia Modern.</i> Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
--	---	---	---	--	--	---------------------------	---

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Nama  
NIP.

Yogyakarta, 28 Agustus 2008  
Guru Mata Pelajaran

Agus Budi Yulianto